

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROSES PENEGAKAN  
HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Perbandingan antara Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan  
Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**OLEH :**

**WAHYUNI**

**NIM : 104 23 025 089**

**PROGRAM S1  
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2009**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Perbandingan antara Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU)”. Persoalan penegakan hukum sampai saat ini masih belum memiliki pengertian dan ukuran yang jelas bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang masih menyuarakan dan menuntut dilakukannya penegakan hukum. Padahal disatu sisi aparat penegak hukum menyatakan sudah melakukan upaya penegakan hukum. Peninjauan tentang *peran aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum* merupakan salah satu sisi yang dapat digunakan untuk mengetahui sudah atau belum terlaksananya penegakan hukum. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui seberapa besarnya peran dan pengaruh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Untuk itu, penelitian tentang proses penegakan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum menjadi penting untuk diteliti.

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dengan Jurusan Jinayah Siyasah (JS), yaitu mahasiswa yang mendalami hukum Islam. Dipilihnya kedua jurusan ini sebagai subjek (responden) dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mereka sebagai mahasiswa yang mendalami hukum Islam terhadap proses penegakan hukum acara pidana Indonesia yang diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum positif di Indonesia.

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dengan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) merupakan dua jurusan yang sama-sama akan menghasilkan Sarjana Hukum Islam (SHI), namun jurusan ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam jenis konsentrasi (fokus) hukum yang dikuasainya. Oleh karena itu, pada penelitian komperatif ini penulis ingin meneliti bagaimana pandangan mereka tentang masalah penegakan hukum acara pidana ini dengan perbedaan jenis konsentrasi hukum yang mereka dalami.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah melaksanakan praktek peradilan ke pengadilan, yaitu mahasiswa semester tujuh keatas tahun akademis 2008/2009 dari masing-masing jurusan. Jumlah populasi mereka masing-masing untuk jurusan PHM adalah 12 mahasiswa, dan untuk jurusan JS sebanyak 53 mahasiswa. Adapun sampel pada penelitian ini, untuk Jurusan PHM penulis tidak menggunakannya karena penulis mengambil jumlah populasi seluruhnya, sedangkan untuk jurusan JS, untuk keseimbangan penelitian penulis mengambil sampel sebesar 50% sehingga diperoleh sampel sebanyak 26 mahasiswa. Untuk itu, teknik pengambilan data menggunakan teknik *Stratified random sampling design* karena sejenisnya subjek penelitian.

Mengenai data dalam penelitian ini penulis mengambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, dan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ini. Data ini dikumpulkan melalui angket dan wawancara yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada untuk dianalisa dengan pendapat atau teori para ahli.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa mahasiswa jurusan PHM dan JS memiliki persepsi yang sama dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan. Sebagian besar mahasiswa setuju dengan peran jaksa penuntut umum, advokat, dan saksi ahli sebagai aparat penegak hukum di pengadilan dengan besar persentase diatas 80% dari setiap jurusan. Untuk peran hakim non muslim dan hakim wanita dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan sebagian besar mahasiswa tidak setuju yang ditunjukkan dengan hasil persentase dibawah 50% dari masing-masing jurusan. Selanjutnya untuk upaya proses penegakan hukum acara pidana melalui putusan hakim dengan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, umumnya persepsi mahasiswa menyetujuinya yang ditunjukkan dengan hasil persentase diatas 57%. Dari hasil jumlah persentase persepsi mahasiswa ini diketahui bahwa persepsi mereka sejalan dengan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistemetika Penulisan.....	12
 <b>BAB II : PROFIL LOKASI PENELITIAN.....</b>	 <b>13</b>
A. Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.....	 15
1. Sejarah.....	15
2. Visi.....	15
3. Misi.....	16
4. Tujuan.....	16
5. Profil Mahasiswa.....	18
6. Kurikulum.....	19
B. Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.....	 20
1. Sejarah.....	20
2. Visi.....	21
3. Misi.....	21
4. Tujuan.....	21
5. Profil Mahasiswa.....	22
6. Kurikulum.....	23

<b>BAB III: PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian penegakan hukum acara pidana.....	24
B. Proses Penegakan hukum acara pidana di pengadilan.....	34
C. Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan perspektif hukum Islam.....	50
 <b>BAB IV : ANALISA PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB (PHM) DAN MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH (JS).....</b>	 <b>77</b>
A. Identitas responden.....	77
B. Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan menurut persepsi mahasiswa PHM dan JS.....	79
C. Faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.....	94
D. Analisa tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa	98
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	122
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>124</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum acara pidana merupakan hal yang sangat urgen di dalam kehidupan. Tanpa adanya penegakan hukum acara pidana akan banyak terjadi tindak pidana di tengah kehidupan, masyarakat akan cenderung mengambil langkah-langkah sendiri untuk mengurus kepentingannya yang akan mengakibatkan kekacauan dan rusaknya sistem kehidupan.<sup>1</sup> Penegakan hukum acara pidana merupakan tanggung jawab setiap masyarakat khususnya para aparat penegak hukum yang telah diberi wewenang secara khusus untuk menangani masalah ini demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tertib dalam kehidupan.

Namun, persoalan penegakan hukum sampai saat ini masih belum memiliki ukuran yang jelas bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang masih menyuarakan dan menuntut dilakukannya penegakan hukum. Padahal di satu sisi aparat penegak hukum menyatakan sudah melakukan upaya penegakan hukum. Peninjauan tentang *peran aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum* merupakan salah satu sisi yang dapat digunakan untuk mengetahui sudah atau belum terlaksananya penegakan hukum. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui seberapa besar peran dan pengaruh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Untuk itu, penelitian

---

<sup>1</sup> Baca: Kohar Hari Sumarno, *Hukum dan Ketahanan Nasional dari Pengalaman Seorang Jaksa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), Cet. Ke-1, h. 14.

tentang proses penegakan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum menjadi penting diteliti untuk mengetahui arti penting dan pengaruh aparat penegak hukum dalam hukum acara pidana pada proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.

Di Indonesia penegakan hukum acara pidana diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Proses penegakan hukum acara pidana diatur di dalam KUHAP sejak di luar pengadilan, yaitu mulai dari adanya suatu peristiwa atau tindakan yang terindikasi mengandung unsur pidana di lapangan yang dikenal dengan *proses penyelidikan* hingga penyelesaian perkara di pengadilan untuk menghasilkan putusan yang bisa sampai pada tingkat eksekusi terhadap putusan (Peninjauan Kembali / PK).

Proses penegakan hukum acara pidana dilaksanakan oleh beberapa aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa penuntut umum, advokat, saksi ahli, dan masyarakat dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya. Masing-masing penegak hukum ini sangat mempengaruhi dan menentukan untuk terwujudnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, peran dan fungsi dari penegak hukum dalam penegakan hukum acara pidana ini harus diketahui dengan jelas.

Sebelum menggunakan KUHAP, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Undang-undang ini dikenal dengan "*Reglemen Indonesia yang dibaharui*" atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44

yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 1 Drt. Tahun 1951.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, walaupun saat ini kita menggunakan KUHAP, namun pengaruh dari undang-undang sebelumnya juga berpengaruh kepada undang-undang ini. Di dalam UU Peralihan (UUD 1945) pasal II dinyatakan bahwa: Segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.<sup>3</sup> Menurut Bustanul Arifin di dalam bukunya *Masa Lampau Yang Belum Selesai, Percikan Pikiran tentang Hukum & pelaksanaan Hukum*: “Hal yang demikian adalah lumrah berlaku di setiap negara yang baru lepas dari penjajah, terutama setelah Perang Dunia ke-2.”<sup>4</sup>

Sebagai UU nasional yang memayungi segenap rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, KUHAP tentunya memiliki perbedaan dengan hukum Islam, baik dari cara pelaksanaannya, sanksi hukum, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari UU pidana yang berlaku di Aceh yang menerapkan hukum Islam secara khusus dari pada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memang memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebagai kajian untuk perbandingan dan bahan pemikiran bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin yang merupakan mayoritas dalam negara Indonesia

---

<sup>2</sup> UU No. 8 Tahun 1981, *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, (tt, Cv. Titik Terang, 1995), Cet. Ke-1, h. 128.

<sup>3</sup> Bustanul Arifin, *Masa Lampau Yang Belum Selesai, Percikan Pikiran tentang Hukum & Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: O.C. Kaligis Associates, 2007), Cet. Ke-1, h. 303.

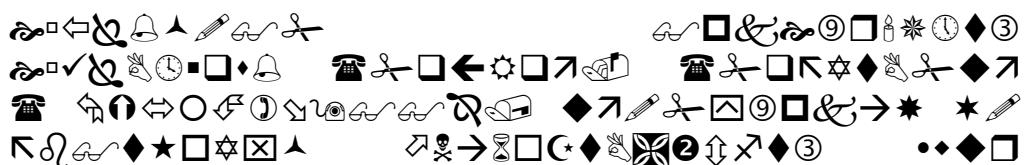
<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 303.



yang tentunya harus melakukan setiap amalan sesuai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Bila ditinjau menurut Islam, proses penegakan hukum acara pidana ini merupakan hal yang urgen. Penyelesaian perkara pidana ini sudah diatur di dalam hukum Islam. Allah SWT secara tegas menyatakan masalah ini di dalam al-Qur'an dan juga melalui as-Sunnah pada masa Rasulullah SAW, kisah nabi-nabi terdahulu dan juga peristiwa-peristiwa yang dialami para sahabat. Antara lain yaitu tentang pentingnya menegakkan hukum (keharusan menegakkan hukum), bagaimana upaya penegakkan hukum, menyelesaikannya dan sanksi-sanksi hukumnya. Sebenarnya, tugas dari para Rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan tersebut, sedangkan tugas dari pengikut-pengikut para Rasul pun tidak lain hanyalah mengikuti jalan ini, agar kenabian tetap menyebar bagi semua manusia di alam semesta ini.

Di dalam Islam, penegakan hukum khususnya di lembaga pengadilan merupakan fadhu kifayah agar menghindari kezaliman dalam memutuskan suatu perselisihan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan suatu hukum di kalangan masyarakat.<sup>5</sup> Perintah untuk menegakkan hukum dan keadilan ini di dalam al-Qur'an antara lain dinyatakan dalam surat al-Maa'idah ayat 8 yaitu:



<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 4, h. 337.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Q.S. al-Maa'idah : 8}<sup>6</sup>

Dipilihnya *persepsi*<sup>7</sup> mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian ini karena sebagaimana kita ketahui, mahasiswa adalah pemuda-pemuda yang merupakan generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita bangsa dimasa depan. Bahkan perubahan-perubahan di dalam Islam, pemudalah pelakunya. Mereka bertindak melakukan perubahan dan perbaikan dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Mahasiswa merupakan komunitas kampus yang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas, karena mereka para penuntut ilmu yang disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sarat dengan ilmu dan perbaikan. Mahasiswa sebagai

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT: Syamil Cipta Media, 2004), h. 100.

<sup>7</sup> Persepsi merupakan kata benda, yaitu: 1. tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 2. proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya 3. (secara psikologi); kesadaran/tanggapan akan sesuatu yang diterima melalui panca indera. Baca; Surawan Martius, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2001), h. 449 dan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4, h. 759.

cendikian muda umumnya berfikir secara ideal. Hal ini karena mahasiswa belum terikat oleh pihak-pihak yang memiliki berbagai kepentingan.

Dalam hal ini, penulis memilih mahasiswa jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah (JS) yang ada di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Adapun alasan penulis memilih mahasiswa dari kedua jurusan tersebut sebagai subjek perbandingan dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwasanya kedua jurusan ini adalah jurusan yang terdapat pada Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) yang tentunya lebih fokus dalam masalah hukum Islam dan memang berkecimpung didalam studi hukum Islam ini. Jadi, penulis ingin meneliti bagaimana persepsi mahasiswa menilai proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan dari sudut pandang mahasiswa muslim yang bergelut di dalam pendidikan hukum Islam.

Kedua jurusan ini yaitu Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab merupakan jurusan yang mengarah pada persoalan-persoalan hukum secara global (keseluruhan), dan Jurusan Jinayah Siyasah mengarah pada persoalan hukum jinayah (pidana) dan siyasah (perpolitikan), sehingga sangat cocok dijadikan subjek dalam penelitian perbandingan ini.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas kedalam bentuk tulisan ilmiah. Dan mengenai penelitian ini penulis memberi judul: **“PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU**

**MENURUT HUKUM ISLAM,** (Studi Perbandingan antara Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU)”

## **B. Batasan Masalah**

Sebagaimana kita ketahui di dalam KUHAP diuraikan, bahwa penegakan hukum acara pidana dimulai sejak di luar pengadilan, yaitu mulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum dari lembaga kejaksaan, pemeriksaan serta putusan oleh hakim dari lembaga kehakiman hingga proses eksekusi terhadap suatu putusan. Oleh sebab itu, dapat kita pahami bahwa proses penegakan hukum ini merupakan proses hukum yang panjang dan kompleks. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada “Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.” Hal ini dengan tujuan untuk menghasilkan tulisan yang jelas dan informasi yang cukup.

## **C. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU terhadap masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.

- 2) Apa faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa tersebut.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU terhadap masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri.
- b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri.
- c) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa pada proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri.

##### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi kalangan akademis terutama yang berkecimpung di bidang hukum, instansi-instansi pemerintah, dan masyarakat yang ingin mengetahui dan membutuhkan informasi dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri menurut hukum Islam.
- b) Guna mengembangkan ilmu dan potensi dalam bidang karya tulis ilmiah

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, tepatnya pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang berada di jalan H.R. Subrantas KM. 15, Panam yang disebut dengan Kampus Raja Ali Haji.

### **2) Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan PHM dan mahasiswa Jurusan JS yang ada di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa dari dua jurusan tersebut dalam memandang masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.

### **3) Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS) pada tahun akademis 2008/2009 yang sudah mengikuti tugas praktek pengadilan, yaitu mahasiswa semester VII keatas. Adapun jumlah populasi mahasiswa PHM dan JS masing-masing adalah 12 dan 53 mahasiswa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Data Statistik Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2007/2008.

Mengenai sampel pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan sampel untuk Jurusan PHM karena populasi pada jurusan ini tidak begitu banyak, sedangkan untuk Jurusan JS, penulis menggunakan sampel sebanyak 50% dari populasi, sehingga didapatkan sampel sebanyak 26 mahasiswa untuk keseimbangan hasil penelitian ini.

Karena populasi pada penelitian komperatif ini jelas dan sejenis, selain itu populasi yang akan diteliti cukup lengkap dan diketahui, serta terdiri dari tingkatan semester, maka teknik pengambilan data yang penulis gunakan yaitu *Stratified random sampling design*.<sup>9</sup>

#### 4) Sumber Data

##### a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara memberikan angket kepada mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyash (JS).

##### b) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ini, seperti Civitas Akademika, lembaga-lembaga penegak hukum, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> *Statified random sampling design* merupakan pembagian dari *probability sampling design* dimana setiap populasi dalam penelitian ini memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Probability sampling design ini merupakan proses penarikan sampel bila data tentang populasi cukup lengkap dan diketahui. Sedangkan stratified random sampling design merupakan pembagian dari probability sampling design berdasarkan strata atau tingkatan. Baca: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke-3, h. 28-30.

#### 5) Metode Pengumpulan Data

- a) Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan data-data yang sedang diteliti, yaitu mahasiswa Jurusan PHM dan mahasiswa Jurusan JS.
- b) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informen penelitian untuk mendapatkan kelengkapan informasi.
- c) Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data secara teoritis.

#### 6) Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Metode Induktif, yaitu dengan cara menjelaskan data yang bersifat umum, kemudian memfokuskannya kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b) Komperatif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyash (JS).

#### 7) Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis nya, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran mengenai apa yang akan ditulis pada penelitian ini, berikut dipaparkan sistematika penelitian yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

**BAB II** : Profil lokasi penelitian, yaitu Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS). Bab ini berisi mengenai sejarah masing-masing jurusan, visi, misi, tujuan, profil mahasiswa, dan kurikulum yang ada pada jurusan ini.

**BAB III** : Tinjauan mengenai proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan dan tinjauannya hukum Islam.

**BAB IV** : Analisa mengenai persepsi mahasiswa Jurusan PHM dan mahasiswa Jurusan JS terhadap proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri, yang meliputi identitas responden, proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan menurut persepsi mahasiswa PHM dengan jurusan JS, faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap proses penegakan hukum di pengadilan, Analisa tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan negeri.

**BAB V** : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



























## **BAB II**

### **PROFIL LOKASI PENELITIAN**

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) adalah dua jurusan yang terdapat pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan ini terletak di Kampus Raja Ali Haji jalan H. R. Soebrantas Km 15 Panam Kota Pekanbaru.

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum semula bernama Fakultas Syari'ah saja, namun dengan adanya perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau dengan paradigma Integralisme Ilmu Pengetahuan Islam, maka nama Fakultas Syari'ah ditambah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.<sup>1</sup>

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum merupakan pengembangan dari Fakultas Syari'ah yang berdiri pada tanggal 21 November tahun 1966 berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1966 di Tembilahan. Setelah dinegerikan dengan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1967 tanggal 4 September 1967, sudah beberapakali mengalami perpindahan induk. Dari IAIN Imam Bonjol, IAIN Sultahan Thaha Syaifuddin Jambi dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai

---

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska RIAU, *Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2007), h. 3.

diresmikannya IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru tanggal 16 September 1970 dengan surat keputusan menteri Agama RI Nomor 1994 tahun 1970.<sup>2</sup>

Pada awal berdirinya, Fakultas Syari'ah hanya berstatus Fakultas Muda dan hanya meluluskan Sarjana Muda dengan Jurusan Qadha'. Namun pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, status Fakultas Syari'ah diangkat menjadi Fakultas Madya. Dengan berkembangnya sumberdaya terdidik di fakultas ini, pada tahun 1997 didirikan Program Pasca Sarjana (S2) ditingkat Institut dengan konsentrasi Hukum Islam. Bahkan pada tahun 2006, dibuka pula Program Doktor (S3) dengan konsentrasi Hukum Islam ini.<sup>3</sup>

Secara filosofis, perubahan nama Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum berkaitan dengan kenyataan munculnya kesadaran dan pencerahan baru didunia Islam terhadap paradigma pendidikan modern. Dari aspek sosiologis, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum mau tidak mau berhadapan dengan berbagai tantangan dari berbagai arah sebagai akibat dari globalisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.3.

## **A. Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM)**

### **1. Sejarah**

Jurusan / Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) adalah salah satu jurusan / prodi yang berada di bawah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan / prodi ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1996 sesuai dengan SK Rektor No. 37 A/R/1996.<sup>5</sup>

### **2. Visi**

Secara integral melalui pendidikan, pengajaran, pengkajian dan pemikiran, serta pengabdian pada masyarakat dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang berkualitas IPTEK, IMTAQ yang profesional dalam bidang hukum dan perbandingan mazhab.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu prodi yang berada di bawah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab memiliki visi yaitu: “Menghasilkan sarjana muslim yang ahli di bidang perbandingan hukum dan mazhab di samping itu juga hukum positif. Melalui pengajaran, pengajian dan pemikiran serta pelayanan kepada masyarakat, di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2013.”

---

<sup>5</sup> Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab, *Bahan Kelengkapan Akreditasi*. (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2007), h. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5.



### 3. Misi

- a. “Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional, serta integritas pribadi sebagai sarjana muslim.
- b. Menjadikan jurusan PHM sebagai sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dalam bidang perbandingan hukum dan mazhab melahirkan sarjana ulama yang mujtahid.
- c. Menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.”<sup>7</sup>

### 4. Tujuan

Berdasarkan visi, misi dan sasaran diatas, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Prodi Perbandingan Hukum Mazhab (PHM) yaitu:

- a. “Menghasilkan sarjana Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) yang mampu menjadi pengelolah (manajer) lembaga pendidikan.
- b. Menghasilkan sarjana Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) yang mampu menjadi pengelola (manajer) Lembaga Pendidikan Agama Islam.
- c. Menghasilkan pemikiran dan karya ilmiah dalam bidang hukum dan perbandingannya dalam konteks *comperatif law*.”<sup>8</sup>

Di dalam analisa swot dijelaskan, bahwa Jurusan PHM memiliki kekuatan, yaitu bahwa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) mempunyai pola yang khusus dalam pengembangan sumber daya manusia setelah melalui transformasi ilmu secara klasikal dalam bidang hukum dan perbandingan mazhab juga dalam bentuk praktek peradilan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Setelah itu, jurusan juga mengadakan praktek peradilan mini di bawah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 6.

bimbingan dosen. Selain dari itu, jurusan yang mengadakan praktek metode istinbath hukum ke lembaga terkait, MUI, NU, Muhammadiyah.<sup>9</sup>

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) sangat terkait dengan pembangunan daerah, yaitu untuk mengisi tenaga hakim agama di Pengadilan Agama dan qadhi-qadhi khususnya di daerah Riau.

Tersedianya tenaga-tenaga dosen profesional berpendidikan S2, S3, dan guru besar. Jurusan PHM menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan untuk mengisi ketenagakerjaan pada Pengadilan Agama, KUA, tenaga pengajar di berbagai lembaga-lembaga pendidikan negeri, dan lembaga-lembaga swasta lainnya. Wawasan dan kesadaran yang kuat untuk memajukan dan mengembangkan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Jurusan PHM diharapkan mampu menanggulangi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka dituntut untuk dapat memperbaiki dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang sesuai dengan syari'at Islam.

Jurusan PHM terus meningkatkan kualitasnya khususnya pada mahasiswa dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, antara lain: berbagai seminar, penelitian, serta mengarahkan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PHM ke organisasi-organisasi profesional.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 6.

Jurusan terus meningkat mutu dan kualitas dosen melalui pengiriman tenaga pengajar ke jenjang S2, dan S3 dalam maupun luar negeri baik melalui jalur Departemen Agama, maupun melalui program silang ke perguruan tinggi negeri yang relevan dan menunjang. Selain itu juga melaksanakan pelatihan-pelatihan dan penelitian-penelitian ilmiah.<sup>10</sup>

#### 5. Profil Mahasiswa

Mahasiswa Jurusan perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) terlibat dalam berbagai organisasi, baik organisasi intern dan ekstern jurusan, fakultas maupun universitas. Organisasi ini antara lain: Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (HMJ-PHM), Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Lembaga Kerohanian Islam dan dakwah kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), HMI dan lain-lain.<sup>11</sup>

Mahasiswa juga diharuskan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, oleh jurusan diadakan program-program, antara lain: praktek peradilan ke PA dan PN, praktek ibadah, seni baca al-Qur'an, praktek penyelenggaraan jenazah, praktek membaca dan membahas kitab, khusus bahasa asing dan komputer, dan metode istinbath hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Baca: h. 8-10.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Baca: h.14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 15.

## 6. Kurikulum

Untuk menyelesaikan program S1 pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab ini, mahasiswa harus mengikuti dan lulus dalam 64 mata kuliah (150 SKS) yang didistribusikan dalam 8 semester.

Kurikulum pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab diklasifikasikan pada lima kategori mata kuliah yang sesuai dengan visi dan misi dari jurusan ini yaitu:

- a. “Keilmuan dan Keterampilan, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Metodologi Studi Islam, Studi al-Qur’an, Studi Hadits, Bahasa Arab (I, II, dan III), Ilmu Tafsir, Metodologi Penelitian (I, II), Pengantar Perbandingan Mazhab, Membahas Kitab, dan Qawaid Fiqhiyah.
- b. Pengembangan Kepribadian, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (I, II, III), Ilmu Sosial Dasar, Akhlak Tasawuf, Fiqh Ibadah, Ilmu Kalam, Aqidah dan Filsafat Ilmu.
- c. Keahlian Berkarya, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Muqaranah al-Mazahib fi al-Ushul, Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh (I dan II), Perbandingan Hukum dan Undang-undang, Fiqh Munakahat, Tafsir, Tafsir Ahkam (I dan II), Hadits, Hadits Ahkam (I dan II), Ushul Fiqh (I dan II), Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Islam, Ilmu Falak (I dan II), Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Peradilan Islam, Tarikh Tasyri’, Fiqh Mu’amalah, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Fiqh Mawaris, Hukum Islam di Indonesia, Sejarah Islam Asia Tenggara, Hukum Adat, Fiqh Siyasah, Arbitrase, Advokasi, Fiqh Kontemporer, Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- d. Berkehidupan Bermasyarakat, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Islam dan Tamadun Melayu, Etika Komunikasi, dan Sosiologi Hukum Islam.
- e. Perilaku Berkarya, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Aplikasi Komputer dan Praktikum.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama UIN SUSKA Riau, *Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2007/2008*. (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2007), h. 95-97.

## **B. Jurusan Jinayah Siyasah (JS)**

### **1. Sejarah.**

Jinayah Siyasah (JS) adalah salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Prodi ini merupakan prodi ketiga di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang berdiri pada tanggal 01 Juli 1996 berdasarkan SK Rektor Nomor 37.a/R/1996. Jurusan Jinayah Siyasah bertujuan menyiapkan sarjana muslim yang memiliki kemampuan akademik mengembangkan pengetahuan agama Islam, khususnya bidang hukum pidana Islam dan juga handal dalam bidang politik Islam serta dapat menerapkannya di tengah masyarakat.

Seiring dengan era globalisasi serta perkembangan Provinsi Riau dan Indonesia umumnya kebutuhan ahli hukum pidana dan politik Islam meningkat, karena hukum pidana dan politik Islam dapat memberi kontribusi yang positif dalam pembangunan sistem hukum dan politik nasional yang lebih berkeadilan dan beretika. Dari tahun ketahun Program Studi Jinayah Siyasah UIN SUSKA Riau tetap diminati calon mahasiswa yang ditandai dengan perkembangan mahasiswa baru setiap tahun yang selalu meningkat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Program Studi Jinayah Siyasah jenjang S1, *Evaluasi Diri*, (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, 2007), h. 1.

2. Visi.

Visi Program Studi Jinayah Siyasah adalah: *“Mewujudkan Program Studi Jinayah Siyasah sebagai wadah pendidikan tinggi Islam utama dan berkualitas yang memelopori pengembangan sistem hukum pidana dan politik Islam secara profesional dan integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013.”*

3. Misi.

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional dalam bidang jinayah dan siyasah secara integral.
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum terutama tentang permasalahan jinayah siyasah dengan mempergunakan paradigma Islami.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat secara integral dengan menggunakan paradigma Islami.
- d. Menyiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam di bidang hukum dan pranata sosial.

4. Tujuan.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Program Studi Jinayah Siyasah yaitu:

- a. Menjadikan Prodi Jinayah Siyasah yang mampu menyelenggarakan program pendidikan tinggi di bidang hukum pidana dan politik Islam yang bermutu, efisien, dan mengakomodasi minat mahasiswa.
- b. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam profesional dan mampu mengidentifikasi permasalahan sosial kontemporer serta tanggap terhadap perubahan masyarakat.
- c. Mewujudkan Jurusan Jinayah Siyasah sebagai pusat keunggulan ilmu-ilmu syari'ah di tingkat nasional dan regional.
- d. Membudayakan masyarakat akademis untuk melakukan penelitian sebagai dasar pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

## 5. Profil mahasiswa.

Dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa, mahasiswa Jinayah Siyasah diwajibkan mengikuti berbagai praktikum, yaitu: praktikum peradilan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, praktek ibadah, perwakafan, pembuatan perda, penelitian, komputer, bahasa asing (arab dan inggris).<sup>15</sup> Selain itu, mahasiswa juga diberikan pelatihan-pelatihan pada kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah.

Mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah terlibat dalam berbagai organisasi, baik organisasi intern seperti pada organisasi prodi, fakultas dan universitas juga organisasi ekstern universitas. Adapun organisasi intern seperti HMJ, BLM, BEM, Pramuka, Menwa, Mapala, Teater, dan LDK. Organisasi diluar kampus yang juga diminati oleh mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah seperti HMI, PMII, KAMMI, dan PMI.<sup>16</sup>

Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah dilaksanakan dalam rangka pembinaan mental spritual mahasiswa, sehingga mereka memiliki kesehatan jasmani, dan rohani untuk mendukung terwujudnya proses perkuliahan secara baik. Untuk tercapainya tujuan tersebut, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah juga dimotivasi untuk mengikuti berbagai kegiatan olah raga.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 26

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 5.

## 6. Kurikulum.

Untuk menyelesaikan program S1 pada Jurusan Jinayah Siyasah ini, mahasiswa harus mengikuti dan lulus dalam 64 mata kuliah (150 SKS) yang di distribusikan dalam 8 semester.

Kurikulum pada Jurusan Jinayah Siyasah diklasifikasikan pada lima kategori mata kuliah yang sesuai dengan visi dan misi dari jurusan ini yaitu:

- a. “Keilmuan dan Keterampilan, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Ushul Fiqh (I dan II), Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dasar, Pengantar Ilmu Politik, Tarikh Tasyri’, Metodologi penelitian, Fiqh Kontemporer, Fiqh Mu’amalah, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayat, Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Adat, Peradilan Agama di Indonesia, Ilmu Falak (I dan II), Tafsir Ayat-ayat Ahkam Jinayah Siyasah, Hadits Ahkam Jinayah Siyasah, Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh Jinayah, Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh Siyasah, Qawaid Fiqhiyah Jinayah Siyasah, Filsafat Hukum Islam, Hukum Acara Administrasi Negara, Hukum tata Pemerintahan, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Administrasi Peradilan Agama, Hukum Islam Asia Tenggara, Membahas Kitab.
- b. Keahlian Berkarya, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Metode Penelitian Jinayah Siyasah, Masail Fiqhiyah Jinayah Siyasah, Advokasi, Kriminologi, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Pemikiran Politik di Indoesia, Praktikum Peradilan, Skripsi.
- c. Pengembangan Kepribadian, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Pansasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengantar studi agama Islam, Studi al-Qur’an, Studi Hadits, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab (I, II, dan III), Bahasa Inggris (I, II, dan III), Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Islam Asia Tenggara, Akhlak Tasawuf, Fiqh Ibadah, Ilmu Kalam, Aqidah, Filsafat Ilmu.
- d. Berkehidupan Bermasyarakat, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: Sosiologi Hukum, Sosiologi Politik.
- e. Perilaku Berkarya, mata kuliah yang terdapat pada kategori ini yaitu: KKN, Etika Profesi Hukum, Manajemen Kepemimpinan, Aplikasi Komputer.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama UIN SUSKA Riau, *Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2007/2008*, *op.cit.*, baca: h. 97-99.





















































### **BAB III**

## **PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

##### **a. Pengertian penegakan hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya *upaya* untuk *tegak* atau *berfungsinya norma-norma hukum* secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, maka pemulihan hukum yang dilanggar harus ditegakkan kembali. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib mentaati norma-norma yang telah ditetapkan dalam penegakan hukum, yaitu norma kemanusiaan, keadilan, kepatuhan, dan kejujuran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly ash-Shiddiqie, *Penegakan Hukum*. (Pekanbaru: Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR, Volume: 15, Oktober 2004), h. 201.

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. Ke-3, h. 115.



Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi*<sup>3</sup> yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>4</sup> Mulyana W. Kusumah dalam bukunya *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum* menyatakan: Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu:

1. “Sudut pandang kultural, yaitu upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk melaksanakan internalisasi hukum pada warga masyarakat.
2. Sudut pandang struktural, yaitu bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa.”<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 pada penjelasan pasal 1 dan 2, yaitu: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstat*) tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*)” yang selanjutnya dalam perkembangan perubahan UUD 1945 Amandemen ke-3 berganti menjadi *Negara Hukum* sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia

---

<sup>3</sup> Diskersi yakni tindakan yang didasari kebijaksanaan situasional dengan menyimpang dari prosedur yang baku. Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), Cet. Ke-1, h. 61.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), Cet. Ke-2, h. 4.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusumah, *op.cit.*, h. 59.

adalah negara hukum”, hal ini tentunya semakin menegaskan keharusan adanya penegakan hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Persoalan yang utama dalam proses penegakan hukum berkisar antara lain pada efektivitas dan dampak sosialnya. *Efektivitas* penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kriteria rancu seperti; jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi aparat penegak hukum, dan sebagainya. Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum, yakni **keadilan**. Atau sejauh mana nilai-nilai hukum prosedural ataupun nilai-nilai hukum substansif telah terimplementasi melalui penegakan hukum.<sup>7</sup>

Di dalam kenyataan seringkali terjadi proses penegakan hukum dijalankan semata untuk mengejar semacam “target” organisasi dalam kerangka perspektif resmi dari pada usaha untuk menempatkannya dalam konteks pencapaian keadilan substansif.<sup>8</sup>

Penegakan hukum yang tidak sebagaimana mestinya ini dikhawatirkan menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang semestinya dilindungi oleh hukum. Masyarakat menjadi enggan menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. ( Jakarta : Prenada Media, 2005), Cet. Ke-1, baca: h. 20.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *op.cit.*, h. 60.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 60.

perkaranya di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa penyelesaian perkara secara kekeluargaan di luar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena mereka tak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya. Bahkan masyarakat juga menjadi alergi dan takut untuk berhubungan dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim meskipun menghadapi kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara hukum.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

---

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI (Mengenang almarhum Prof. Dr. Komar Kanta Atmadja, SH, LL.M.*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1998), Cet. Ke-1, h. 507.

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>10</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga bisa dilihat secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup *nilai-nilai keadilan* yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut *penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja*.<sup>11</sup>

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. *Hukum formal* hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan *hukum material* mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Jimly ash-Shiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang

---

<sup>10</sup> Jimly ash Shiddiqie, *op. cit.*, h. 202.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 202.

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, pembahasan mengenai penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batasan-batasannya.<sup>12</sup>

Hukum yang harus ditegakkan pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan *nilai-nilai keadilan* yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya *mencari dan menemukan kebenaran material untuk diwujudkan keadilan material*. Kewajiban demikian berlaku, baik di dalam bidang pidana maupun di bidang perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi mata uang yang sama.<sup>13</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 203.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 202.

saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat.

Namun, secara umum, tugas para aparat penegak hukum ini antara lain meliputi upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penegakan keadilan di negara Indonesia ini.

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa penegakan hukum merupakan *proses*, memfungsikan norma-norma hukum dengan *upaya*. Norma-norma bisa diartikan undang-undang, dan upaya merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan *menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak* sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 3.

Penegakan hukum bukan berarti semata-mata penegakan UU, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian.<sup>15</sup> Ini sebagaimana dijelaskan Soerjono dalam bukunya *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, bahwa pada hakikatnya penegakan hukum berarti penegakan keadilan.

Masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. “Faktor hukumnya sendiri, seperti undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”<sup>16</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Adapun menurut Abdul Hakim G. Nusantara dalam bukunya *Politik Hukum Indonesia*, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: aspek sosial, politik, dan ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>17</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), Cet. Ke-1, baca: h. 20-24.

Penegakan hukum harus diupayakan dengan baik dan sungguh-sungguh, hal ini karena penegakan hukum merupakan keinginan dari setiap warga masyarakat. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka akan timbul sikap pada masyarakat untuk mengambil langkah sendiri dalam penegakan hukum yang cenderung main hakim sendiri dalam mempertahankan kepentingan dan haknya. Untuk tegaknya hukum sesuai dengan harapan, maka hukum yang ditegakkan harus mencerminkan cita-cita masyarakat mengenai kebenaran dan keadilan. Pelaksanaannya harus berwibawa dan mempunyai kesadaran tinggi dalam penegakannya.

Tanpa tegaknya hukum, tidak mungkin ada stabilitas. Apabila para penegak hukum tidak mampu bertindak, pasti masyarakat tidak merasakan jaminan adanya kepastian hukum yang berkeadilan, dan tidak pula akan ada ketertiban. Keadaan demikian pasti mengganggu stabilitas nasional. Penegakan hukum juga berkaitan dengan masalah ketahanan nasional, semakin mampu penegak hukum menegakkan hukum, semakin tercipta ketahanan nasional.

#### b. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah: *“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat*



*dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”*<sup>18</sup>

Adapun menurut Ramelan, “Hukum acara pidana merupakan peraturan yang diadakan oleh negara yang menentukan berbagai aspek penyelesaian perkara pidana apabila ada orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana yang berisi aturan yang mengatur hubungan antara perorangan dengan negara yang dilaksanakan bagi kepentingan umum.”<sup>19</sup>

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum acara materil dengan hukum acara formil (inilah yang dimaksud dengan hukum acara pidana).<sup>20</sup>

Jadi, dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum acara pidana berarti: *“Upaya penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana dengan penyelesaian melalui penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan kebijaksanaan demi keadilan.”*

---

<sup>18</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Baca: h. 4 dan 5.

<sup>20</sup> Baca: Aswarni Adam & Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), Cet. Ke-1, h. 109.

## **B. Proses Penegakan Hukum Acara Pidana di pengadilan.**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengadilan sosial oleh negara.<sup>21</sup> Ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instasional kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semuanya bertolak dari acuan yang sama, yakni perangkat kebijaksanaan pidana (*criminal policy*). Termasuk disalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, dan undang-undang yang mengatur kekuasaan masing-masing organisasi peradilan pidana.<sup>22</sup>

Proses penegakan hukum pidana diupayakan oleh penegak hukum melalui penegakan hukum acara pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam undang-undang ini dijelaskan, bahwa proses penyelenggaraan penegakan hukum acara pidana melalui beberapa proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dan pegawai negeri sipil yang terkait, penuntutan melalui institusi kejaksaan oleh penuntut umum, pemeriksaan dan

---

<sup>21</sup> Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. Ke-2, h. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 3.

pemutusan oleh lembaga kehakiman, hingga eksekusi serta pengawasan. Semua proses hukum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat pada setiap proses hukumnya.<sup>23</sup> Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

1. “Penyidikan.
  - a. Penyelidikan
  - b. Penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan di pengadilan.
  - a. Masuknya surat pelimpahan perkara
  - b. Pemberitahuan pemanggilan para terdakwa dan saksi.
  - c. Persidangan
    - 1) Pembukaan sidang.
    - 2) Pemanggilan dan pemeriksaan terdakwa di ruang sidang.
    - 3) Pembacaan surat dakwaan.
    - 4) Pemeriksaan keterangan saksi.
    - 5) Pemeriksaan keterangan ahli.
    - 6) Pembuktian.
    - 7) Pengajuan tuntutan.
    - 8) Putusan.
4. Upaya hukum.
  - a. Upaya hukum biasa.
    - 1) Pemeriksaan tingkat banding.
    - 2) Pemeriksaan untuk kasasi.
  - b. Upaya hukum luar biasa.
    - 1) Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.
    - 2) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Pelaksanaan putusan pengadilan.
6. Pengawasan putusan pengadilan.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Profesional*. (Pekanbaru: Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR, April, 2005). Volume: 16, baca: h. 5.

<sup>24</sup> UU No. 8 Tahun 1981, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (tt, CV. Titik Terang, 1995), Cet. Ke-1, baca: h. 54-123.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I pada tulisan ini, bahwa masalah penelitian ini dibatasi pada *proses penegakan hukum di pengadilan* yang meliputi *proses hukum* dan *upaya penegak hukum* menurut aturan yang terdapat didalam KUHAP.

Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan dimulai apabila adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri. Penuntutan adalah: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. (Pasal 1 ayat 7 KUHAP)

Dalam pasal 1 ayat 6 huruf b dinyatakan bahwa penuntut umum adalah: “*Jaksa* yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan *penuntutan* dan melaksanakan penetapan hakim”. Dan pada huruf ayat 1 ayat 6 huruf a dijelaskan, bahwa jaksa adalah: “Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. (Pasal 137 KUHAP)

Institusi kejaksaan sebagai penegak hukum dijelaskan dalam UU No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan tanggal 30 Juni 1961, yaitu pada pasal 1 ayat 1 bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara *penegak hukum* yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.<sup>25</sup>

Kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat 1). Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 1 ayat 2).

Dalam pasal 14 KUHAP dijelaskan, bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. “Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan *prapenuntutan* apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

---

<sup>25</sup> UU No. 15 tahun 1961 tentang: *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan*, tanggal 30 Juni 1961.

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.”<sup>26</sup>

Mengenai tugas penuntut umum ini dijelaskan dalam KUHP pasal 138 hingga pasal 144 dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1. “Mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik.
- 2. Membuat surat dakwaan.
- 3. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan segera mengadili dengan disertai dengan surat dakwaan.”<sup>27</sup>

Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan dibedakan menjadi tiga jenis pemeriksaan. Adapun tiga jenis pemeriksaan di pengadilan ini yaitu: Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Adapun pemeriksaan di sidang pengadilan yang dimaksud di sini yaitu pemeriksaan pada *Acara Pemeriksaan Biasa*, hal ini karena pemeriksaan pada acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan yang melalui proses yang kompleks, sedangkan acara pemeriksaan singkat dan cepat merupakan acara

---

<sup>26</sup> UU No. 8 Tahun 1981, *op.cit.*, h. 19.

<sup>27</sup> *Ibid.*, baca: h. 66-69.

pemeriksaan yang sifatnya mudah, sederhana, dan merupakan hukum acara untuk kasus-kasus ringan yang terancam hukuman paling lama lima bulan.<sup>28</sup>

Adapun aturan pada pemeriksaan pada Acara Pemeriksaan Biasa diatur di dalam KUHAP pada pasal 152 hingga pasal 202. “Dalam hal pengadilan negeri menerima *surat pelimpahan perkara* dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.”<sup>29</sup> Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Selanjutnya, hakim yang menetapkan hari sidang ini memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Mengenai pemanggilan ini diatur pada pasal 145 dan 146 KUHAP, “Panggilan ke pengadilan ini diberitahukan secara sah melalui surat panggilan yang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa dan saksi.”<sup>30</sup>

Selanjutnya, pada hari yang ditentukan pengadilan melaksanakan sidang. Sidang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Adapun proses-proses pada persidangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, baca: Pasal 203 dan 205.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 72.

<sup>30</sup> *Ibid.*, baca: h. 70.

## 1. Pembukaan sidang.

Mengenai pembukaan sidang diatur di dalam KUHAP pada pasal 153, di sini sidang dimulai dengan pembukaan yang dibuka oleh hakim ketua sidang dan menyatakan sidang *terbuka untuk umum* kecuali dalam *perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak*. Selain itu, hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>31</sup>

## 2. Penghadiran terdakwa di persidangan.

Penghadiran terdakwa keruang sidang diatur didalam KUHAP pada pasal 154, adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- b. Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka hakim ketua sidang harus meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- c. Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, baca: h. 73.



- d. Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.”<sup>32</sup>

### 3. Pembacaan surat dakwaan.

Surat dakwaan *dibacakan oleh penuntut umum* atas permintaan hakim ketua sidang. Mengenai pembacaan surat dakwaan ini diatur di dalam KUHP pada pasal 155 dan 156, adapun aturannya sebagai berikut:

- a. “Surat dakwaan dibacakan, kemudian setelah surat dakwaan dibacakan, selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- b. Jika terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. “Keberatan terdakwa atau penasehat hukum ini dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah *eksepsi*.”<sup>33</sup>
- c. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, baca: h. 74-75.

<sup>33</sup> Ramelan, *op.cit.*, h. 204.

<sup>34</sup> *Ibid.*, baca: h. 70.

#### 4. Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan terdakwa diatur di dalam KUHAP pada pasal 175 dan pasal 176, adapun aturannya adalah sebagai berikut:

1. “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.
2. Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga *putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.*”<sup>35</sup>

#### 5. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi yaitu dengan mendengarkan keterangannya. Selain mendengarkan keterangan saksi yang mengetahui tentang suatu perkara, dalam proses penegakan hukum acara pidana juga memungkinkan penggunaan keterangan saksi ahli. Mengenai keterangan ahli diatur didalam KUHAP pada pasal 179 dan 180, yaitu, “Bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Jika dalam hal ini timbul keberatan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, baca: h. 82-83.

yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli, maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang ini. Penelitian ulang ini dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.”<sup>36</sup>

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. (Pasal 179 ayat 2)

## **6. Pembuktian**

Pembuktian dilakukan dengan menunjukkan barang bukti, penunjukan barang bukti diatur pada pasal 181 KUHAP, adapun ketentuannya adalah: “Bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, baca: h. 84.

selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.”<sup>37</sup> “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali *apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya* (Pasal 183 KUHP).”<sup>38</sup> Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Mengenai ketentuan tentang *alat bukti yang sah* diatur di dalam KUHP pada pasal 184 hingga pasal 189, adapun aturannya sebagai berikut:

a. Keterangan saksi.

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. *Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*”<sup>39</sup> Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, baca: h. 84.

<sup>38</sup> *Ibid.*, baca: h. 86.

<sup>39</sup> *Ibid.*, baca: h. 87.

keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b. Keterangan ahli.

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”<sup>40</sup> Keterangan ahli, baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

c. surat.

Surat di sini yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

1. “Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>41</sup> *Ibid.*, baca: h. 88.

d. Petunjuk.

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”<sup>42</sup> Petunjuk sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diperoleh dari:

1. “Keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.”<sup>43</sup>

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa.

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”<sup>44</sup> Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 89.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## **7. Tuntutan dan Pembelaan.**

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, tata cara persidangan dilanjutkan dengan proses *requisitoir* dan *pleidooi*. Tuntutan dan pembelaan Mengenai pengajuan tuntutan dan pembelaan ini diatur pada pasal 182 KUHAP.<sup>45</sup> Pengajuan *requisitoir* (tuntutan) pidana oleh penuntut umum diajukan secara tertulis, dan tuntutan ini dilakukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan *pleidooi* (pembelaan)nya secara tertulis.<sup>46</sup> Pembelaan ini dapat dijawab oleh penuntut umum, proses ini dikenal dengan istilah *replik* (jawaban atas *pleidooi*). Mengenai replik ini, terdakwa dapat memberikan

---

<sup>45</sup> Ramelan, *op.cit.*, h. 220.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 220-221.

tanggapan yang disebut dengan istilah *duplik*. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa *terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir*.<sup>47</sup>

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika pengajuan dan tuntutan ini telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan *dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi*, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.<sup>48</sup>

## 8. Putusan

Selanjutnya, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Musyawarah ini harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Adapun mengenai aturan dalam musyawarah diatur pada pasal 182 ayat 5 hingga ayat 8 KUHAP yaitu:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 221.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 221.



1. “Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan *dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua*, sedangkan *yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis* dan *semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya*.
2. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis *merupakan hasil permufakatan bulat* kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
  - b. Jika putusan dengan suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah *pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa*.<sup>49</sup>

Pelaksanaan pengambilan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Putusan pada pengadilan Negeri bukanlah hasil akhir, pendakwa ataupun terdakwa pada proses peradilan di pengadilan negeri dapat melakukan upaya hukum yang prosesnya tidak lagi ditangani oleh pengadilan negeri. Upaya hukum ini dibagi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini terbagi dua, yaitu pemeriksaan tingkat banding

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, baca: h. 5-86.

dan pemeriksaan untuk kasasi. Sama halnya dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa juga terbagi dua, yaitu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini adalah proses akhir dari proses penegakan hukum acara pidana, yang mengakibatkan si penderita hukum mendapatkan putusan akhir dan pelaksanaan eksekusi atau putusan yang harus diterimanya dan dijalankannya.

### **C. Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan perspektif hukum Islam.**

#### **a. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan hukum.**

Sesungguhnya keadilan merupakan satu nilai ajaran Islam yang termulia, karena dengan menegakkan keadilan dan kebenaran akan menebarkan ketenteraman, menyebarkan rasa keamanan, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan nikmat harta kekayaan, menambah kesejahteraan, dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi tersebut tidak mengalami kerusakan dan kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya dalam bekerja, berproduksi, dan berbakti kepada negara tanpa menghadapi halangan yang dapat menghambat kegiatannya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 4, h. 355.

Keadilan merupakan prinsip hukum Islam, hal ini sebagaimana Firman

Allah SWT antara lain dalam surat asy-Syuura ayat 17 yaitu:

  
 Artinya: “Allah yang menurunkan kitab (al-Qur’an) dengan (membawa)

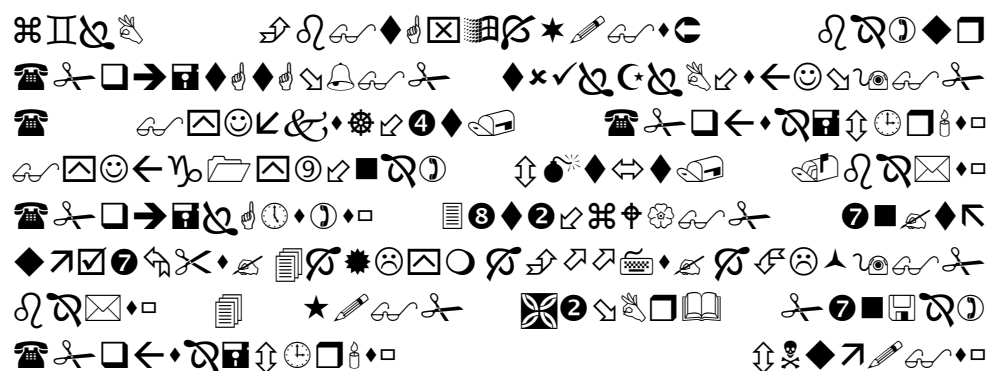
*kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu,*

*boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat ?”<sup>51</sup>*

{Q.S. asy-Syuura (42): 17}

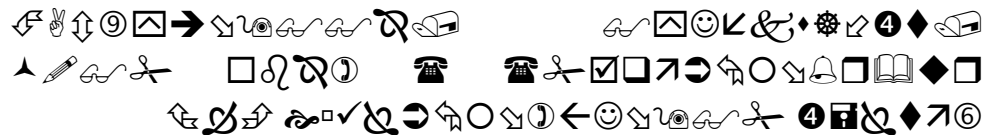
Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaannya. Mereka adalah mufti, pemerintah, juru da’wah, dsb.<sup>52</sup>

Kemestian berlaku adil ini juga terdapat pada surat al-Hujurat ayat 9 yaitu:



<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT: Syamil Cipta Media, 2004), h. 485.

<sup>52</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UIN Bandung, 1995), Cet. Ke-1, h. 73.



Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>53</sup> {Q.S. al-Hujurat (49): 9}

Selain itu, perintah untuk menegakkan keadilan juga dapat kita ketahui dari hadits dibawah ini:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يُقَامُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً وَحَدُّ الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى لِمَنْ فِيهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Satu hari bagi pemimpin yang adil lebih baik dari pada ibadah selama enam puluh tahun. Dan hukuman yang ditegakkan di muka bumi secara benar lebih suci bagi penduduk yang ada padanya dari pada hujan selama empat puluh hari di pagi hari.”<sup>54</sup>  
(H.R. ath-Thabrani di dalam al-Kabir dan al-Kabir adalah hasan dan diriwayatkan pula oleh al-Ashbahani dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: Keadilan satu hari lebih baik dari pada ibadah enam

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 516.

<sup>54</sup> Al-Hafizh Syaihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (Ibnu Hajar al-Asqalani), *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 527.

puluh tahun. Dan dari jalur yang lain dengan lafazh: Wahai Abu Hurairah, keadilan sesaat lebih baik dari pada ibadah enam puluh tahun, melakukan sholat pada malam hari, dan puasa di siang harinya. Dan ia menambahkan: Wahai Abu Hurairah, kelaliman sesaat dalam memberikan hukum lebih berat dan lebih besar di sisi Allah dari pada kemaksiatan selama enam puluh tahun).<sup>55</sup>

Keadilan hanya dapat terwujud dengan menyampaikan setiap hak kepada orang yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah, juga dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia. Sebenarnya, tugas dari para Rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan tersebut, sedangkan tugas dari pengikut-pengikut para Rasul pun tidak lain hanyalah mengikuti jalan ini, agar kenabian tetap menyebar bagi semua manusia.<sup>56</sup>

Sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Hadiid (57) ayat 25:



<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 528.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

Artinya : *“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”*<sup>57</sup> {Q.S. al-Hadiid (57): 25}

## **b. Hukum Acara Pidana Di Dalam Islam.**

### **1. Pengertian hukum acara pidana di dalam Islam.**

Hukum acara (*al-ahkam al-Marafa'at*) yaitu hukum yang mengatur masalah pengadilan, tata cara di pengadilan, kesaksian dan sumpah. Adanya hukum ini bertujuan agar putusan hakim di pengadilan objektif dan memuaskan pihak-pihak yang mencari keadilan. Untuk itu, dalam hukum ini terdapat sejumlah aturan yang memberikan peluang kepada hakim untuk menyingkap mana pihak yang benar dan mana yang salah. Sedangkan hukum pidana (*al-ahkam al-jinayat*) yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Adanya hukum ini bertujuan untuk menjaga, memelihara stabilitas keamanan masyarakat dalam kehidupan. Dalam hukum tersebut dibicarakan berbagai aturan seperti larangan

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 541.

membunuh, berzina, mencuri, merampok, dan dijelaskan pula sanksi bagi pelaku.<sup>58</sup>

Proses hukum acara pidana didalam Islam adalah proses peradilan yang dikenal dengan istilah *qadla'*. Peradilan merupakan sarana utama dalam mewujudkan keadilan, karena dapat menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan, dan harta benda. Orang yang pertama memegang jabatan pengadilan dalam Islam adalah Rasulullah saw, sebagaimana termuat didalam perjanjian sesudah hijrah antara kaum muslimin, yahudi, dan lainnya sebagai berikut:<sup>59</sup>

إِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ شِجَارٍ يُخَافُ  
فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya apa yang berlaku antara para pendukung perjanjian tersebut berupa suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan suatu kerusakan, maka sesungguhnya tempat pengembaliannya adalah hanya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah”.<sup>60</sup>

Seluruh sahabat Nabi SAW menetapkan bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan oleh agama adalah mendirikan peradilan. Mereka semua menetapkan bahwa peradilan itu adalah:

فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

---

<sup>58</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-1, h. 22.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 335.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 336.

Artinya: “Suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi yang harus diikuti”.<sup>61</sup>

Demikianlah kalau kita tinjau persoalan ini dari segi naqal, apabila ditinjau dari segi akal, maka qadha itu suatu keharusan untuk melindungi kepentingan orang-orang teraniyaya dan untuk menghilangkan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat.<sup>62</sup>

## **2. Objek perkara peradilan.**

Tentang perkara yang diadili, fuqaha sependapat bahwa hakim mengadili setiap perkara, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia.<sup>63</sup>

## **3. Proses peradilan.**

### **a. Tempat.**

Dimasa Nabi saw sampai masa-masa khalifah-khalifah sesudahnya, sidang pengadilan selalu diadakan ditempat terbuka dimasjid atau ditempat umum yang tidak ada larangan bagi orang lain mengikuti jalannya persidangan. Jadi, prinsipnya, persidangan dalam peradilan Islam adalah terbuka (untuk umum) sehingga dakwaan gugatan itu diketahui (secara terbuka) dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan

---

<sup>61</sup> Teungku Muhammad Hashbi ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riezki Putera, 1997), Cet. Ke-2, h. 37.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>63</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, (Terjemahan: *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), j. 3, Cet. Ke-2, h. 681.



sengketa itu diikuti sertakan sehingga perkara itu selesai dan membawa ketenangan, ketakutan dan jera kecuali apabila qadli memandang perlu demi kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara, maka di adakan sidang secara tertutup.<sup>64</sup>

Imam Syafi'i berkata: "Saya menyukai hakim memutuskan perkara ditempat yang dapat dilihat banyak orang tanpa terhalang oleh sesuatu, berada di tengah kota, serta bukan di dalam mesjid, karena banyak manusia yang mendatangi para hakim untuk tujuan yang berbeda dengan asa pembangunan suatu mesjid. Hendaknya memutuskan perkara dilakukan pada tempat yang sesuai baginya."<sup>65</sup>

#### **b. Pembukaan Sidang.**

Adil Musthafa Bayuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan adabul qadhi dalam persidangan antara lain hakim harus bertawakal pada Allah SWT dan memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.<sup>66</sup>

Untuk kesuksesan menjalankan tugasnya, seorang hakim harus selalu memohon panduan dan pertolongan dari Allah SWT, karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa adanya bantuan

---

<sup>64</sup> Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, h. 67.

<sup>65</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Terjemahan: Muktashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh, Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 743.

<sup>66</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-1, h. 36.

dan petunjuk-Nya. Oleh karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim, hakim harus selalu hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang hakim tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka konsekuensinya keadilan tidak tercipta dalam kehidupan bermasyarakat dan keadaan sosial masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu, seorang hakim harus selalu memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT dengan selalu berdo'a padanya.<sup>67</sup>

**c. Menghadirkan terdakwa.**

Pada hari yang ditentukan untuk persidangan, hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau kuasa mereka, tentang siapa yang harus diadili ini fuqaha sependapat bahwa yang harus diadili adalah orang muslim yang hadir. Namun, menurut Malik dan Syafi'i, tentang pengadilan terhadap orang yang tidak hadir karena bepergian dalam tempo waktu yang lama dapat diadili. Sedangkan menurut Abu Hanifah, orang yang bepergian tidak dapat diadili.<sup>68</sup>

Sedangkan fuqaha berpendapat tidak ada peradilan terhadap orang yang ghaib berpegang pada sabda Nabi SAW:

فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِحَسَبِ مَا أَسْمَعُ (أخرجه البخاري ومسلم)

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>68</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 709.

Artinya: “Sesungguhnya aku hanya memutuskan (kemenangan) untuk dia berdasarkan apa yang aku dengar.”<sup>69</sup> (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lain dari Ali r.a., bahwa ketika Rasulullah mengutus Ali ke Yaman, maka Beliau bersabda:

لَا تَقْضِ لِأَحَدٍ لِّخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ (اخرجه أبو داود و أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu mengeluarkan keputusan untuk salah seorang lawan sampai kamu mendengar dari pihak lainnya.”<sup>70</sup> (H.R. Abu Daud dan Ahmad)

#### **d. Upaya Damai.**

Seorang hakim dituntut untuk berusaha keras mencari kemungkinan-kemungkinan berdamai bagi pihak-pihak yang bertikai karena keputusan sebuah perkara yang diberikan oleh hakim pada banyak kasus melahirkan permusuhan berkelanjutan bagi pihak yang bertikai. Walaupun sebuah pengadilan dituntut untuk tidak menunda suatu proses perkara, namun pengadilan tetap dapat diproses atau ditunda jika ada kemungkinan untuk berdamai. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 10, yaitu:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 710.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 710.



Dalam persidangan, qadli wajib berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara . Dalam hal ini Umar bin Khattab r.a berkata:

رُتُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ  
يُورِثُ الضَّعَائِنَ.

Artinya: “Kembalikanlah penyelesaian perkara, di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat melakukan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak”.<sup>72</sup>

Tetapi tidak boleh perdamaian itu dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian juga tidak boleh mengulur-ulur proses persidangan karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Dalam hal ini Imam Malik Berkata:

وَلَا أَرَى لِلْوَالِي أَنْ يُلْحِقَ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَوْ يُعْرِضُ عَنْ  
خُصُومَتِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُصَالِحَ.

Artinya: “Saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa salah satu pihak yang berperkara dan menyampingkan permusuhan salah

---

<sup>72</sup> Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, h. 68.

satu pihak itu karena semata-mata ingin mencapai perdamaian”.<sup>73</sup>

Kemudian, jika nyata-nyata perdamaian itu tidak mungkin dicapai, atau tidak ada keinginan untuk itu, maka dimulai kembali pemeriksaannya.

#### **e. Pemeriksaan.**

Kemudian qadli melanjutkan memeriksa penggugat tentang gugatannya, sesudah dipenuhinya persyaratan dan dipandang patut didengar keterangannya, kemudian jika qadli berkesimpulan bahwa hakekat persoalannya tidak sebagaimana lahirnya, dan sebenarnya tidak ada perselisihan dan pertentangan antara mereka, maka ia tidak perlu melanjutkan pemeriksaan tersebut.<sup>74</sup>

Gugatan ini disebut juga dengan istilah dakwaan. Kata Dakwaan adalah bentuk jamak dari kata *da'waa*. Secara bahasa *da'waa* berarti *thalab* (tuntutan, permintaan).<sup>75</sup> Pengertian secara syara' adalah menghubungkan/mengaitkan seseorang kepada diri sendiri hak atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Orang yang menyampaikan dakwa'an ini disebut juga dengan *mudda'i*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 355.

(pendakwa), yaitu orang yang meminta hak.<sup>76</sup> Pendakwa adalah orang yang diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Pada dasarnya, orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya.<sup>77</sup> Hal ini sebagaimana hadits berikut:

فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَنِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

Artinya: “Diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rasulullah saw bersabda: Bukti wajib bagi si pendakwa, dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya”.<sup>78</sup>

Suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan kenyataannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Artinya: “Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda: Seandainya manusia diberikan kebebasan berdasarkan dakwaan mereka,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 335.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 335.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 356.

maka akan banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi, orang yang didakwa itu harus bersumpah.” (H.R. Ahmad dan Muslim)<sup>79</sup>

Dalam pemeriksaan dakwaan, hakim wajib mendengarkan keterangan pendakwa dan terdakwa. Hal ini sebagaimana hadits Nabi:

يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ  
الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّكَ وَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

Artinya: “Wahai Ali, bila ada dua orang yang bersengketa, menghadap kepadamu, maka janganlah engkau mengadili antara keduanya sehingga engkau mendengar orang yang kedua sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya jika engkau melakukan hal itu, maka akan jelaslah bagimu peradilannya”.<sup>80</sup> (H.R. Ahmad, Abu daud dan Tirmidzi)

Kemudian dilanjutkan pemeriksaan atas tergugat berdasarkan adanya gugatan agar ia menjawab gugatan tersebut dan boleh menunda persidangannya atas permintaan pihak-pihak yang berperkara dengan tidak ada maksud mengulur-ulur waktu, dan jika telah terbukti dengan adanya pengakuan, maka harus diputus berdasarkan atas pengakuan tersebut. Tetapi jika tergugat menyangkal, maka terhadap penggugat harus diminta bukti atas gugatannya dan ditunda persidangannya apabila hal itu dianggap perlu. Dan apabila penggugat tidak dapat menyampaikan bukti

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 355.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 336.



atau buktinya tidak sempurna, maka menjadi kuatlah kedudukan tergugat dan qadli harus memutus berdasarkan sumpah tergugat atau penolakannya bersumpah.<sup>81</sup>

## 6. Pembuktian.

Pembuktian dilakukan dengan adanya alat bukti, menurut Ibnu Rusyd, pengadilan itu berdasarkan empat hal, yaitu keterangan saksi, sumpah, penolakan sumpah, dan pengakuan atau penggabungan dari keempat perkara ini.<sup>82</sup> Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### a. Keterangan Saksi.

Hukum Islam telah menetapkan masalah saksi ini, bahwa pada perkara pidana, yang menjadi ketentuan dalam mendengarkan keterangan saksi ini yaitu:

#### 1. Bilangan saksi.

Kaum muslim sepakat bahwa perbuatan zina tidak dapat ditetapkan dengan bilangan saksi yang kurang dari empat orang yang adil dan laki-laki. Mereka juga sepakat bahwa semua hak selain zina dapat ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil dan lelaki. Kecuali *al-Hasan al-Bashri* yang berpendapat bahwa hak-

---

<sup>81</sup> Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 70.

<sup>82</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 684.

hak tersebut tidak dapat diterima dengan saksi yang kurang dari empat orang, karena disamakan dengan rajam.<sup>83</sup>

## 2. Jenis kelamin Saksi.

Fuqaha berselisih pendapat tentang diterimanya kesaksian dalam masalah hudud. Pendapat yang dipengangi jumhur fuqaha ialah bahwa kesaksian dua orang perempuan dalam masalah hudud tidak diterima, baik bersama-sama dengan orang lelaki maupun hanya perempuan saja.<sup>84</sup>

Menurut fuqaha *zhahiri*, kesaksian orang perempuan dapat diterima untuk segala urusan apabila disertai dengan saksi laki-laki dan saksi perempuan ini harus lebih dari satu orang.<sup>85</sup>

Mengenai kesaksian perempuan saja tanpa laki-laki, menurut jumhur fuqaha kesaksian mereka dapat diterima dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak badan yang pada ghalibnya tidak dilihat oleh orang laki-laki seperti kelahiran, jeritan bayi lahir, dan cacat orang perempuan. Kesemuanya ini tidak diperselisihkan kecuali yang berkenaan dengan sususan.<sup>86</sup>

## 4. Sifat Saksi.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 690.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 691.

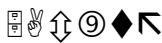
<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 691.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 692.

Sifat-sifat yang dipegangi dalam menerima saksi secara garis besar ada lima, yaitu:<sup>87</sup>

a). Adil.

Kaum muslimin sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksiaan saksi berdasarkan firman Allah SWT:<sup>88</sup>



Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”<sup>89</sup> {Q.S. ath-thalaq (65): 2}

Namun fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian adil. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa adil merupakan satu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara’ dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan makhruh.<sup>90</sup>

Menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perbedaan pendapat disebabkan oleh keraguan mereka tentang mafhum kata adil yang menjadi

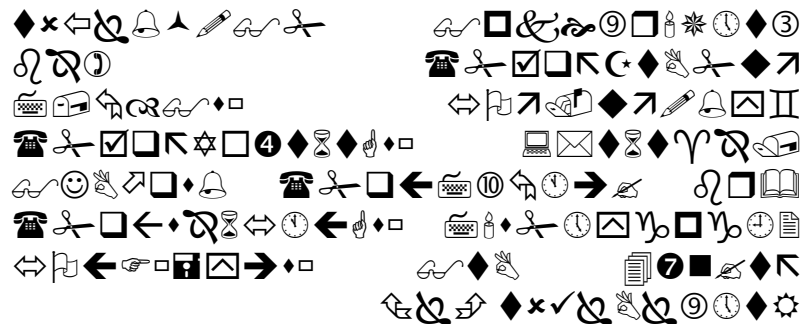
<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 684.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 684.

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 558.

<sup>90</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 684.

bandingan fasik. Yang demikian itu karena fuqaha sepakat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak diterima berdasarkan firman Allah:<sup>91</sup>



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”<sup>92</sup> {Q.S. al-Hujurat (49): 6}

Tetapi fuqaha tidak berselisih bahwa kesaksian orang fasik tersebut dapat diterima, apabila telah diketahui tobatnya. Kecuali jika kesaksiannya itu terjadi sebelum melakukan *qadzaf*.<sup>93</sup> Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertobat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.<sup>94</sup> Silang pendapat ini

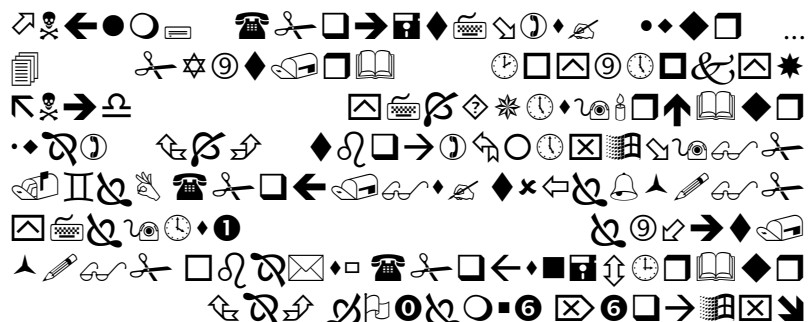
<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 684.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 516.

<sup>93</sup> *Qadzaf* adalah tuduhan berbuat zina, baik secara terang-terangan ataupun sindiran. Baca: Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 623.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 685.

disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah SWT berikut:



Artinya: “...dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>95</sup> {Q.S. an-Nur (24): 4-5}

b). Dewasa.

Fuqaha sepakat bahwa kedewasaan itu menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih tentang kesaksian anak-anak sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam kejahatan pelukaan dan pembunuhan.

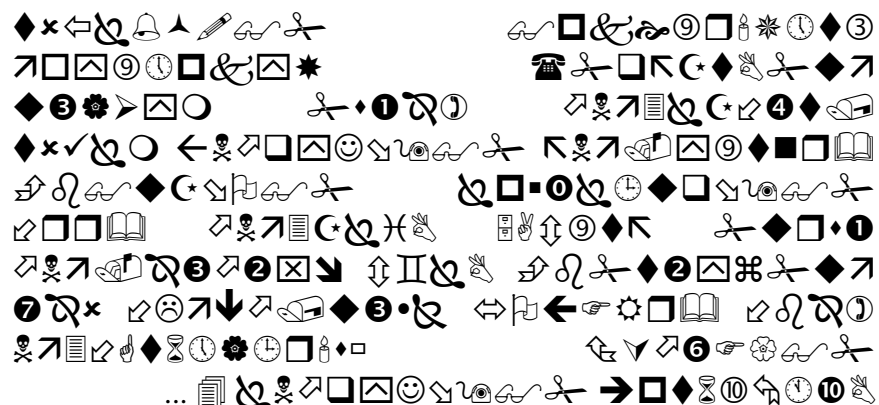
Jumhur fuqaha Amshar menolak kesaksian mereka, karena telah menjadi ijma’, bahwa syarat seorang saksi adalah adil, dan di antara syarat adil adalah dewasa. Karena itu menurut Malik, kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukanlah kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk. Karena itu menurut

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 350.

Malik, dalam kesaksian anak-anak, Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.<sup>96</sup>

c). Islam.

Fuqaha sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir itu tidak dibolehkan kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama seperti pemberian wasiat dalam bepergian berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Wahai orang-orang yang berima! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian...”<sup>97</sup>  
{Q.S. al-Maidaah (5): 106}

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 686.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 125.

Menurut Abu Hanifah, hal itu dibolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Sedang menurut Malik dan Syafi'i, itu tidak boleh, dan menurut mereka ayat itu telah dihapuskan (*mansukhah*).

d). Merdeka.

Kemerdekaan menurut jumhur fuqaha Amshar menjadi syarat diterima atau tidaknya kesaksian. Sedangkan menurut Fuqaha Zhahiri, kesaksian seorang hamba itu dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan itu adalah keadilan. Masalah kehambaan tidak berpengaruh pada penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah ditetapkan oleh Kitabullah, as-Sunnah, atau ijma'.<sup>98</sup>

e). Tidak diragukan niat baiknya.

Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian.<sup>99</sup>

Namun fuqaha berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan iktikad baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan duniawi. Dalam hal ini fuqaha Amshar menolaknya, hanya saja dalam perkara tertentu mereka sependapat

---

<sup>98</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *loc.cit.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 361.

untuk memakai keraguan terhadap iktikad baik itu, dan dalam perkara yang lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga berselisih pendapat, sebagian memakainya dan sebagian yang lain tidak memakainya.<sup>100</sup>

**b. Sumpah.**

Fuqaha sepakat bahwa sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat apabila penggugat tidak mempunyai saksi.<sup>101</sup> Dan syarat sumpah yang disepakati ulama terhadap suatu gugatan ataupun yang menghapuskannya adalah *sumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain dia*.<sup>102</sup>

**c. Penolakan Sumpah.**

Fuqaha berselisih pendapat tentang tetapnya hak bagi pihak tergugat berdasarkan penolakannya untuk bersumpah atau bersaksi (nukul).<sup>103</sup>

Menurut Malik, Syafi'i, Fuqaha Hijaz dan segolongan Fuqaha Irak, apabila pihak tergugat menolak sumpah, maka penggugat tidak ada keharusan untuk menolak sumpah juga. Untuk mendapatkan haknya, ia (penggugat) hanya dituntut untuk bersumpah mendapatkan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 688.

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 693.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 694.

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 700.



satu orang saksi. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya serta sebagian besar Fuqaha Kuffah, dengan penolakan tergugat, penggugat dimenangkan atas tergugat. Ketentuan ini berlaku dalam urusan harta sesudah penggugat dituntut untuk mengulang-ulang sumpah sampai tiga kali.<sup>104</sup>

Pengembalian sumpah yang diterima menurut Malik, itu statusnya sama dengan seorang saksi perempuan, atau seorang saksi dan satu kali sumpah. Menurut Syafi'i, pembalikan sumpah itu terdapat pada setiap perkara yang diharuskan adanya sumpah. Ibnu Abi Laila mengatakan: "Saya menolak sumpah bukan karena tuduhan yang diragukan, dan saya tidak akan menolak sumpah karena tuduhan."<sup>105</sup>

Tentang apakah sumpah karena tuduhan itu dapat berbalik atau tidak, bagi Malik ada dua pendapat. Fuqaha yang berpendapat bahwa sumpah itu dapat berbalik berpegang pada sebuah hadits berikut:<sup>106</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ فِي الْقَسَامَةِ الْيَهُودَ بَعْدَ أَنْ بَعَدُوا بِالْإِنْصَارِ. (أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ)

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 701.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 701.

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 701.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengembalikan sumpah kepada orang-orang yahudi dalam qasamah sesudah Beliau memulai menyumpah orang-orang Anshar.”

(H.R. Darimi)<sup>107</sup>

Malik mengemukakan argumen antara lain bahwa sesuatu hak itu dapat ditetapkan hanya dengan dua cara untuk bersumpah, yaitu dengan sumpah dan saksi, atau dengan penolakan dan saksi, atau dengan penolakan mendatangkan saksi dan sumpah. Sebab, menurut Malik pada dasarnya dua-dua (*istainah*) dalam kesaksian itu disyaratkan.<sup>108</sup>

Menurut Syafi’i, suatu perkara tidak dapat ditetapkan berdasarkan saksi dan penolakan sumpah. *Fuqaha* yang memvonis perkara berdasarkan penolakan sumpah mengemukakan, ketika kesaksian berfungsi untuk menetapkan gugatan, sedangkan sumpah berfungsi untuk membatalkan kesaksian, maka apabila tergugat menolak untuk bersumpah, sudah seharusnya gugatan dimenangkan oleh penggugat.<sup>109</sup>

Tentang pemindahan sumpah dari tergugat kepada penggugat, mereka berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan nash,

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 701.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 701.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 702.

karena telah ditentukan bahwa sumpah itu menjadi pegangan pihak tergugat. Demikianlah pokok-pokok alasan yang dipakai oleh hakim dalam memvonis perkara.<sup>110</sup>

#### **d. Pengakuan.**

Pengakuan (ikrar) adalah dasar yang paling kuat karena itu ia hanya mengena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain, kecuali pada perkara-perkara yang disebutkan perincian-perinciannya di dalam kitab-kitab fiqh.<sup>111</sup> Jika pengakuan itu memang jelas, tidak ada perselisihan bagi keharusan dipertimbangkannya pengakuan tersebut dalam peradilan.<sup>112</sup>

Secara bahasa ikrar adalah *istbaat* (penetapan). Asal kata ikrar adalah *qarraasy syaia, yaqirru*. Ikrar secara syari'at berarti pengakuan atas apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil terkuat dalam penetapan dakwaan pendakwa. Oleh karenanya, mereka mengatakan bahwa ikrar merupakan bukti utama, juga dinamakan kesaksian diri.<sup>113</sup>

Para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa ikrar disyari'atkan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana firman Allah swt:

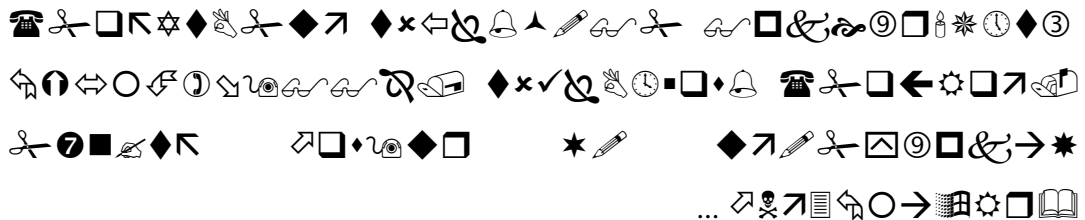
---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 702.

<sup>111</sup> Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 101.

<sup>112</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *loc.cit.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 357.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, *walaupun terhadap dirimu sendiri...*”<sup>114</sup> {Q.S. an-Nisaa’ (4): 135}

Ikrar merupakan hujjah terbatas yang tidak berlaku selain selain orang yang melakukan ikrar. Apabila seseorang berikrar mengenai orang lain, maka ikrarnya tidak diberlakukan. Hal ini berbeda dengan bukti, hal ini karena bukti merupakan hujjah mengenai orang lain.

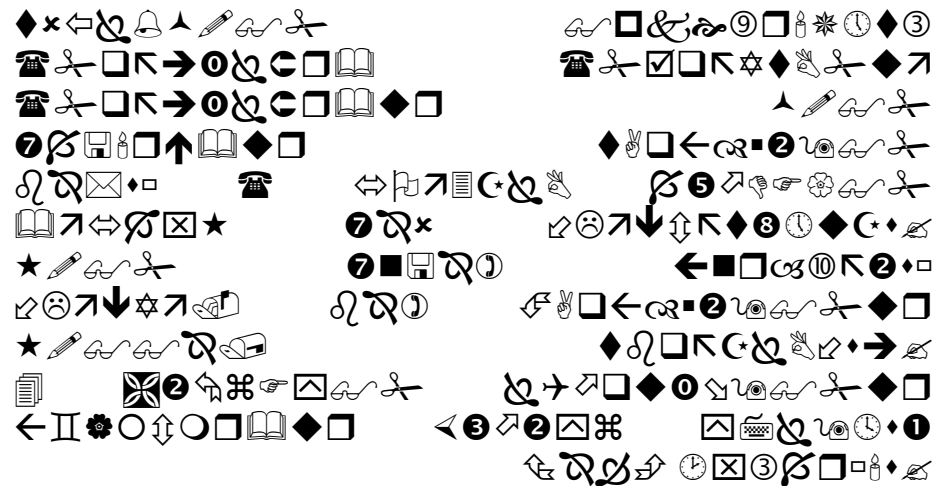
## 7. Putusan.

Tugas-tugas qadla (lembaga peradilan) ialah *menampakkan hukum agama*, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum telah ada dalam hal yang telah dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menetapkan kedalam kenyataan bukan menetapkan sesuatu yang sudah ada.<sup>115</sup>

Allah memerintahkan kepada kita untuk memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan dengan keadilan, hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 59 berikut:

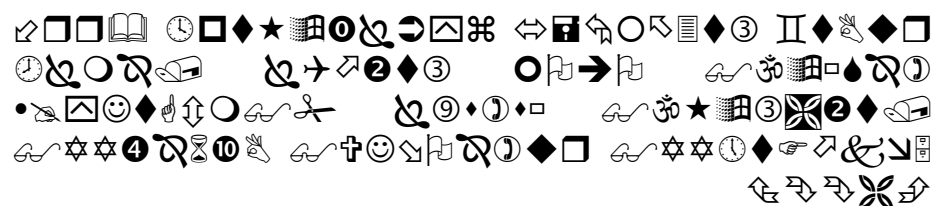
<sup>114</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 100.

<sup>115</sup> Teungku Muhammad hashbi ash Shiddieqy, *op.cit.*, h. 34.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>116</sup> {Q.S an-Nisaa’ (4): 59}

Dalam memutuskan suatu perkara, Allah SWT melarang kita berlaku curang, hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisaa ayat 112 berikut:



Artinya: “Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”<sup>117</sup> {Q.S. an-Nisaa (4): 112}

<sup>116</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 87.

<sup>117</sup> *Ibid.*, h. 96.

Demikianlah Allah mengatur secara jelas, bahwa setiap putusan yang kita buat harus sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (sesuai dengan aturan Allah SWT).













































































































































































**BAB IV**

**PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB  
DENGAN MAHASISWA JURUSAN JINAYAH SIYASAH TENTANG PROSES  
PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN**

**A. Identitas Responden**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dengan mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa (JS) yang telah melaksanakan praktek peradilan di pengadilan khususnya pengadilan negeri. Untuk Jurusan PHM, populasi berjumlah 12 orang yang diambil seluruhnya tanpa menggunakan sampel mengingat sedikitnya jumlah mahasiswa pada jurusan ini. Sedangkan untuk jurusan JS, jumlah populasi berjumlah 53 mahasiswa dengan persentase sampel 50%, sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 26 mahasiswa. Hal ini dengan tujuan untuk keseimbangan hasil penelitian.

**TABEL 1**  
**KLASIFIKASI POPULASI BERDASARKAN SEMESTER DAN JENIS**  
**KELAMIN**

No	Semester	Mahasiswa Jurusan PHM				Mahasiswa Jurusan JS			
		LK	Persentase	PR	Persentase	LK	Persentase	PR	Persentase
1	Semester VII	2	20 %	2	66,67 %	11	23,91 %	1	14,29 %
2	Semester IX	2	20 %	-	33,33 %	17	36,96 %	4	57,14 %
3	Semester XI	4	40 %	-	-	11	23,91 %	1	14,29 %
4	Semester XIII	2	20%	-	-	7	15,22 %	1	14,29 %
<b>Jumlah</b>		10	100 %	2	100 %	46	100 %	7	100 %

Sumber Data: Data Statistik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU 2008.

Adapun mahasiswa yang menjadi subjek dari penelitian di atas adalah mahasiswa semester tujuh keatas. Hal ini adalah karena subjek dari penelitian ini yaitu mahasiswa yang sudah mengikuti praktek peradilan ke pengadilan yang diwajibkan oleh fakultas, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Juga dengan pertimbangan bahwa pada semester tujuh keatas mahasiswa umumnya sudah mengikuti hampir semua mata kuliah sehingga lebih memiliki pengetahuan yang cukup. Adapun penjelasan data mahasiswa berdasarkan tingkat semesternya adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**KLASIFIKASI RESPONDEN BERDASARKAN SEMESTER**  
**DAN JENIS KELAMIN**

No	Semester	Mahasiswa Jurusan PHM				Mahasiswa Jurusan JS			
		LK	Persentase	PR	Persentase	LK	Persentase	PR	Persentase
1	Semester VII	2	20 %	2	100 %	7	31,82 %	-	-
2	Semester IX	2	20 %	-	-	11	50,00 %	3	75,00 %
3	Semester XI	4	40 %	-	-	2	9,09 %	1	25,00 %
4	Semester XIII	2	20%	-	-	2	9,09 %	-	-
<b>Jumlah</b>		10	100 %	2	100 %	22	100 %	4	100 %

Sumber Data: Data Statistik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU 2008.

### **B. Proses Penegakan Hukum Acara Pidana di Pengadilan menurut Persepsi Mahasiswa PHM dengan Jurusan JS.**

Dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana, berarti kita membahas mengenai upaya penegak hukum dalam proses hukum pidana. Penegak hukum dalam proses penegakan hukum acara pidana pengadilan di Indonesia antara lain dilakukan oleh hakim, jaksa, dan advokat. Adapun proses hukum di pengadilan dimulai sejak masuknya surat perkara ke pengadilan negeri yang disampaikan oleh lembaga kejaksaan yang diwakili oleh penuntut umum yang disebut dengan surat dakwaan. Mengenai perwakilan pendakwa kepada penuntut umum dari lembaga kejaksaan ini merupakan hal yang perlu diteliti bagaimana aturannya di dalam hukum Islam. Namun sebelum itu, berikut dipaparkan mengenai masalah perwakilan terdakwa oleh jaksa penuntut umum menurut persepsi mahasiswa, adapun tanggapannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**TABEL 3**  
**Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Proses Penuntutan**  
**oleh Jaksa Penuntut Umum**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	10	83,33 %	21	80,77 %
2.	Tidak Setuju	2	16,67 %	5	19,23 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar mahasiswa PHM dan JS setuju dengan peran jaksa penuntut umum dalam proses upaya penegakan hukum di pengadilan. Persentase jawaban setuju oleh mahasiswa jurusan PHM dan JS sama-sama diatas delapan puluh persen, sedangkan untuk jawaban tidak setuju oleh masing-masing jurusan tidak sampai dua puluh persen.

Untuk yang menjawab setuju, umumnya mahasiswa jurusan PHM dan JS memiliki argumen yang sama. Menurut mereka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai persoalan baru yang menuntut negara untuk menangani suatu masalah dengan berbagai prosedur, bahkan prosedur tersebut dirasakan cukup rumit oleh sebagian masyarakat, terutama untuk masyarakat non akademis yang umumnya minim pengalaman dengan berbagai prosedural-prosedural yang ditetapkan di berbagai institusi. Jadi, keberadaan jaksa sangat membantu masyarakat yang bermasalah dengan persoalan pidana. Masalah kerumitan administrasi dan prosedur serta tidak sederhananya masalah dan banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan paham dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku akan sangat membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan lewat penuntut umum melalui lembaga Kejaksaan.

Menurut Widodo<sup>1</sup>: “Masyarakat Indonesia masih banyak yang buta hukum terutama dalam masalah proses penegakan *hukum acara* pidana yang tentunya melalui proses hukum yang rumit dan panjang.” Penuntut umum sebagai

---

<sup>1</sup> Widodo, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 15 Januari 2009.

profesi penegak hukum akan lebih memahami dan tentunya profesional dalam melaksanakan kewajibannya. Mereka memiliki kecakapan di bidang ini sebagai profesinya yang berada di bawah suatu institusi tersendiri yang merupakan suatu fasilitas yang diberikan negara untuk masyarakatnya.

Zulfan<sup>2</sup> berpendapat: “Adanya lembaga yang berwenang sangat membantu masyarakat yang tidak mengerti”. Penuntut umum bisa melakukan berbagai proses pemeriksaan dengan gerak yang lebih bebas karena kelegalan lembaga yang menaungi mereka.

Mudhofir<sup>3</sup> berpendapat: “Bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum di pengadilan sudah melalui berbagai proses sejak proses penyelidikan di kepolisian hingga masuk dan sampainya berita acara ke lembaga kejaksaan”. Proses ini dianggap cukup dalam proses upaya penegakan hukum. Selain itu, Irwansyah<sup>4</sup> berpendapat: “Bahwa persoalan pidana adalah persoalan yang menyangkut masalah *pemeliharaan* yang urgen.” Di dalam Islam, masalah yang urgen disebut masalah yang bersifat *dharuri* (utama), persoalan dharuri ini antara lain persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa. Pemeliharaan

---

<sup>2</sup> Zulfan Efendi, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XI, *Wawancara*, Jalan Merpati Sakti Panam, 13 Januari 2009.

<sup>3</sup> Mudhofir, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

<sup>4</sup> Irwansyah, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

terhadap hal-hal yang dharuri juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkannya.

Wiwik<sup>5</sup> berpendapat: “Seorang jaksa dalam mengajukan tuntutan lebih mengetahui hukuman apa yang pantas untuk terdakwa sesuai undang-undang tanpa dibuat-buat sedang jika pendakwa sendiri yang melakukan tuntutan, terkadang bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu tentang aturan hukum mengenai hukuman apa yang layak diajukan kepada terdakwa.”

Adapun untuk mahasiswa yang menjawab tidak setuju dengan proses upaya penuntutan yang diwakilkan oleh penuntut umum dari lembaga kejaksaan berpendapat bahwa proses upaya penuntutan dilakukan oleh pendakwa sendiri lebih mewakili rasa keadilan si pendakwa, karena mereka mengalami sendiri peristiwa tersebut, sehingga mereka lebih memahami peristiwa atau permasalahan yang terjadi.

Kemudian, upaya penegakan hukum dalam proses hukum acara pidana juga diupayakan oleh advokat, bahkan untuk terdakwa yang terkena perkara pidana yang terancam hukuman di atas lima tahun penjara diwajibkan untuk memiliki seorang pengacara. Mengenai hal ini, persepsi mahasiswa dalam masalah ini dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wiwik Soneta, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XI, *Wawancara*, Jalan Garuda Sakti Panam, 16 Januari 2009.



**TABEL 4**  
**Jawaban Responden Terhadap Penggunaan Jasa Advokat**  
**Dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	11	91,67 %	24	92,31 %
2.	Tidak Setuju	1	8,33 %	2	7,69 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar mahasiswa PHM dan JS setuju dengan peranan dan penggunaan jasa advokat di pengadilan. Masing-masing persentasenya di atas sembilan puluh persen. Untuk yang tidak setuju tidak setuju dengan penggunaan jasa advokat di pengadilan hanya sebagian kecil saja, yaitu tidak sampai sepuluh persen dari masing-masing jurusan.

Selain jumlah perbandingan persentase yang sama dari segi kuantitas, jurusan-jurusan ini juga memiliki alasan yang sama untuk argumen-argumen yang mereka dikeluarkan. Untuk mahasiswa yang menjawab setuju, umumnya antara mahasiswa PHM dan JS memiliki alasan yang sama, mereka berpendapat bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dalam proses upaya penegakan hukum.

Utama<sup>6</sup> berpendapat: “Bahwa adanya jasa advokat dalam proses penegakan hukum sangat membantu masyarakat dalam proses hukum acara pidana dan hal-hal konsultasi hukum lainnya.” Baik bagi terdakwa maupun

---

<sup>6</sup> Utama, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XIII, *Wawancara*, Panam, 15 Januari 2009.

pendakwa karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses suatu hukum, penggunaan jasa advokat, bahkan aturan untuk menggunakan jasa advokat untuk kasus hukum yang terancam lima tahun perkara atau lebih akan sangat membantu terdakwa untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Ini juga menunjukkan adanya penghargaan hukum terhadap hak seseorang, hak hidup, kebebasan, dan mendapatkan perlindungan di depan hukum. Menurut Solehuddin<sup>7</sup>: “Seseorang mempunyai hak mendapat keadilan yang sama di mata hukum.” Ini berarti seseorang boleh mengupayakan hal-hal yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan.

Menurut Rusli<sup>8</sup>: “Penggunaan jasa advokat diperlukan, karena Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah.” Selain itu, menurut Rutifah<sup>9</sup>: “Penggunaan jasa advokat akan membantu seseorang untuk mempertahankan hak-haknya dari ketidakadilan seperti penetapan hukum yang tidak sewajarnya (melebihi perbuatan hukum yang dilakukannya).” Menurut Zulhendri<sup>10</sup>: “Adanya advokat merupakan salah satu alat kontrol dalam upaya penegakan hukum agar berjalan dengan benar dan melahirkan keadilan.”

---

<sup>7</sup> Solehuddin HR, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>8</sup> Mantara Rusli, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 14 Januari 2009.

<sup>9</sup> Rutifah, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>10</sup> Zulhendri, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XIII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan yang tidak kalah penting peranannya dalam upaya penegakan hukum di pengadilan ini adalah peranan saksi dalam bentuk keterangan, keterangan saksi dalam pasal 184 KUHAP dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Adapun mengenai saksi didalam KUHAP dibagi menjadi dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Mengenai keterangan saksi ahli inipun tentunya harus berdasarkan aturan hukum Islam juga. Adapun persepsi mahasiswa mengenai penggunaan keterangan saksi ahli ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 5**  
**Jawaban Responden Terhadap Keterangan Saksi Ahli**  
**Dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	12	100 %	23	88,46 %
2.	Tidak Setuju	-	-	3	11,54 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa seluruh mahasiswa jurusan PHM setuju dengan peranan saksi ahli dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Sedangkan untuk jurusan JS, walaupun sebagian besar mahasiswa jurusan ini setuju dengan peran saksi ahli, yaitu mendekati angka sembilan puluh persen, namun ada juga mahasiswa yang tidak setuju dengan peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum di pengadilan.

Untuk mahasiswa yang menjawab setuju umumnya, baik jurusan PHM maupun JS memiliki kesamaan argumen. Menurut Azlan<sup>11</sup>: “Keterangan saksi ahli dapat membantu dan menguatkan pembuktian dalam mencari kebenaran, kejelasan dan kepastian suatu peristiwa hukum.” Menurut Zulfan<sup>12</sup>: “Ada hal-hal yang hanya bisa diungkap kebenarannya oleh ahli (seseorang yang ahli dalam profesi tertentu).” Menurut Widodo<sup>13</sup>: “Di zaman modern ini, tindak pidana yang dilakukan orang sangat beragam dan menggunakan alat-alat yang canggih, sehingga tindak pidana yang dilakukannya pun menjadi sangat canggih sehingga harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidang tersebut untuk mengungkap kebenarannya.” Menurut Jatmiko<sup>14</sup>: “Keberadaan saksi ahli sangat penting, karena ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan yang tidak diketahuinya tidak dibenarkan, karena sesuatu yang dilakukan dan diputuskan harus ada ilmunya.”

Adapun untuk yang tidak setuju dengan keberadaan saksi ahli mereka berpendapat bahwa keberadaan saksi ahli terkadang bisa menyebabkan tidak tegaknya hukum karena mereka bisa dibayar oleh pihak-pihak tertentu yang

---

<sup>11</sup> Azlan, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>12</sup> Zulfan Efendi, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XI, *Wawancara*, Jalan Merpati Sakti Panam, 13 Januari 2009.

<sup>13</sup> Widodo, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 15 Januari 2009.

<sup>14</sup> Jatmiko, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

memiliki kepentingan. Seorang saksi ahli dikhawatirkan menyampaikan hal-hal yang tidak benar (bohong).

Selanjutnya, aparat yang sangat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum dan menjadi penentu dalam proses upaya penegakan hukum adalah hakim. Di dalam Islam, untuk menjadi hakim ada aturan dan syarat yang tertentu yang harus di penuhi. Salah satu syarat yang sangat substansial yaitu mengenai agama seorang hakim, seorang hakim disyaratkan harus beragama Islam. Adapun mengenai agama / keyakinan hakim dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan tidak diatur di dalam KUHAP, agama tidak menjadi syarat seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun persepsi mahasiswa mengenai hal ini, dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 6**  
**Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim Non-muslim**  
**Dalam Proses Penegakan hukum Acara Pidana**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	4	33,33 %	8	30,77 %
2.	Tidak Setuju	8	66,67 %	18	69,23 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa umumnya mahasiswa tidak setuju dengan peran hakim non-muslim dalam proses penyelesaian dan upaya penegakan hukum acara di pengadilan. Jumlah persentase pendapat mahasiswa

yang tidak setuju hampir mendekati tujuh puluh persen jumlah responden dari masing-masing jurusan. Sedangkan untuk jawaban responden yang setuju dengan penyelesaian perkara oleh hakim non muslim hanya sekitar tiga puluh persen saja. Namun bila dibandingkan dengan jawaban responden pada masalah peran jaksa penuntut umum, jasa dan peran advokat, serta peran saksi ahli yang juga umumnya menjadi jawaban mayoritas, jumlah persentase padanya umumnya di atas tujuh puluh persen, sedangkan jawaban setuju untuk masalah tugas hakim non muslim dalam penyelesaian perkara di pengadilan ini jawabannya hanya sekitar enam puluh persen saja (tidak mencapai angka tujuh puluh persen) meskipun jawaban ini merupakan jawaban mayoritas responden.

Untuk mahasiswa yang menjawab setuju mereka berpendapat bahwa, boleh saja hakim non-muslim menjadi hakim untuk orang Islam jika ia adalah seorang yang ahli, selain itu, karena hukum yang dijalankan juga bukan hukum Islam jadi tidak menjadi masalah. Menurut Mudhofir<sup>15</sup> dan Sopian Hadi<sup>16</sup>: “Negara kita bukan negara Islam, jadi tidak mengapa jika hakim yang memutuskan persoalan adalah non-muslim.” Selain itu menurut Fazli<sup>17</sup>: “Selama

---

<sup>15</sup> Mudhofir, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

<sup>16</sup> Sopian Hadi, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester XIII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 15 Januari 2009.

<sup>17</sup> M. Fazli, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

hakim tersebut jujur dan cakap dia boleh menjadi hakim walaupun berbeda agama.”

Adapun mahasiswa yang menjawab tidak setuju antara lain Mardinis<sup>18</sup> yang berpendapat bahwa: “Perbedaan agama berpengaruh pada profesionalitas seorang hakim dalam memutuskan perkara.” Menurut Azlan<sup>19</sup>: “Hal ini dikhawatirkan karena berbeda agamanya seorang hakim mengakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab moral untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.” Adapun menurut Jatmiko<sup>20</sup>: “Keadilan hanya bisa didapatkan melalui orang yang ’alim tentang agama.”

Selanjutnya, di dalam Islam mengenai perkara pidana memiliki aturan tersendiri di dalam Islam. Di dalam Islam berbedanya perkara hukum yang ditangani, apakah perkara tersebut perkara perdata ataukah perkara tersebut adalah perkara pidana memiliki aturan yang berbeda. Hal ini juga menyangkut mengenai jenis kelamin hakim yang menangani suatu perkara tertentu. Adapun mengenai persepsi mahasiswa dalam masalah ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>18</sup> Mardanis, Mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XIII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 13 Januari 2009.

<sup>19</sup> Azlan, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>20</sup> Jatmiko, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

**TABEL 7**  
**Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim Wanita**  
**Dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	6	50,00 %	12	46,15 %
2.	Tidak Setuju	6	50,00 %	14	53,85 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa untuk jurusan PHM, jumlah mahasiswa yang menjawab setuju dan tidak setuju dengan peran hakim wanita dalam menegakkan hukum dalam proses hukum acara pidana di pengadilan memiliki persentase yang sama yaitu masing-masing lima puluh persen. Begitu juga dengan jurusan JS, walaupun tidak sama-sama berbanding sama-sama lima puluh persen seperti jurusan PHM untuk yang menjawab setuju dan tidak setuju pada jurusan JS ini, namun jumlah persentasenya menunjukkan perbandingan yang hampir seimbang, hanya berselisih beberapa angka saja antara jawaban yang setuju dengan yang tidak setuju, konkritnya perbandingan jawaban yang setuju dengan yang tidak setuju untuk jurusan JS yaitu: 46,15 % : 53,85 %. Jadi dapat disimpulkan, bahwa baik jurusan PHM maupun JS, setengah dari mahasiswanya setuju dengan peran hakim wanita dalam upaya penegakan hukum acara pidana di pengadilan.



Untuk mahasiswa yang menjawab setuju, menurut Firmansyah<sup>21</sup>: “Wanita memiliki kemampuan yang sama dengan pria dalam menegakkan keadilan.” Menurut Syukur<sup>22</sup>: “Asalkan seorang wanita mempunyai kemampuan, dia bisa diberikan hak untuk menjadi hakim.”

Sedangkan mahasiswa yang menjawab tidak setuju umumnya berpendapat bahwa laki-laki pemimpin kaum wanita. Menurut Suhdi<sup>23</sup>: “Kedudukan hakim sama dengan pemimpin, dan pemimpin harus laki-laki.” Menurut Amikuddin<sup>24</sup>: “Karena di dalam al-Qur’an sudah dinyatakan bahwa sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita.” Selain itu menurut Adi<sup>25</sup>: “Wanita dalam memutuskan perkara sering terbawa perasaan (emosional).” Hal ini juga sama menurut Rutifah<sup>26</sup>: “Bahwa pada dasarnya, wanita banyak memiliki perbedaan dengan laki-laki baik dari segi kemampuan, kondisi fisik maupun psikologinya.”

---

<sup>21</sup> Firman Syah, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>22</sup> Syukur, Mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 13 Januari 2009.

<sup>23</sup> Suhdi, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Panam, 17 Januari 2009.

<sup>24</sup> Amikuddin HB, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 16 Januari 2009.

<sup>25</sup> Adi Indria Putra, Mahasiswa Jinayah Siyasah (JS), Semester IX, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 15 Januari 2009.

<sup>26</sup> Rutifah, Mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 13 Januari 2009.

Hal yang sangat urgen dalam upaya penegakan hukum dan sangat menentukan untuk menilai suatu hukum adil dan telah ditegakkan adalah pada putusan hakim. Di dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”* (dua alat bukti dan keyakinan hakim). Adapun persepsi mahasiswa mengenai hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 8**  
**Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim dengan Dua Alat Bukti dan Satu Keyakinan Dalam Proses Penegakan hukum Acara Pidana**

No	Alternatif Jawaban	Mahasiswa Jurusan PHM		Mahasiswa jurusan JS	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	9	75,00 %	15	57,69 %
2.	Tidak Setuju	3	25,00 %	11	42,31 %
<b>Jumlah</b>		12	100 %	26	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar mahasiswa setuju dengan keputusan hakim dengan menggunakan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya. Hanya saja, persentase jawaban setuju dari responden jurusan PHM lebih besar dari pada jurusan JS. Untuk jurusan PHM, mahasiswa yang menjawab setuju sebesar 75 %, sedangkan untuk jurusan JS persentasenya sebesar 57,69 %. Dan untuk jawaban responden yang tidak setuju putusan hakim

dengan menggunakan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya untuk kedua jurusan sama-sama tidak mencapai lima puluh persen.

Untuk mahasiswa yang menjawab setuju umumnya memiliki argumen yang sama antara jurusan PHM dan JS. Menurut Mudhofir<sup>27</sup>: “Dua alat bukti dan terutama keyakinan hakim merupakan faktor yang dapat menguatkan alat bukti untuk memutuskan suatu perkara.” Selain itu menurut Rutifah<sup>28</sup>: “Keyakinan hakim merupakan kekuatan yang dimiliki hakim, karena hakim adalah orang yang bijaksana, maka keyakinannya merupakan buah dari hasil ijtihadnya.” Menurut Andi<sup>29</sup>: “Kalau alat bukti sudah lebih dari satu, itu sudah bisa menjadi syarat untuk dapat menjatuhkan putusan sudah bisa digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan.” Adapun pendapat yang menjawab tidak setuju, Menurut Jatmiko<sup>30</sup>: “Dua alat bukti masih membuat peluang lemahnya hasil sebuah putusan.” Menurut Pri<sup>31</sup>: “Dalam perkara pidana, bukti harus jelas, dan keyakinan bukan merupakan alat bukti.”

---

<sup>27</sup> Mudhofir, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

<sup>28</sup> Rutifah, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

<sup>29</sup> Andi Surya Winata, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah, Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau, 14 Januari 2009.

<sup>30</sup> Jatmiko, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Semester XI, *Wawancara*, Pondok Pesantren Nurul Huda al-Islami Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, 13 Januari 2009.

<sup>31</sup> Prihartono Simanjuntak, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah, Semester VII, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau, 12 Januari 2009.

### C. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Proses Penegakan Hukum di Pengadilan

Dari data-data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden, baik mahasiswa jurusan PHM maupun jurusan JS umumnya memiliki persepsi yang sama tentang masalah penegakan hukum acara pidana di pengadilan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

**TABEL 9**  
**REKAPITULASI PERSENTASE JAWABAN MAHASISWA**

No	Indikator dalam Penegakan Hukum Acara Pidana di Pengadilan	Setuju (Persentase)		Tidak Setuju (Persentase)	
		PHM	JS	PHM	JS
1	Peran jaksa penuntut umum sebagai aparat yang menyampaikan tuntutan dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	83,33 %	80,77 %	16,67 %	19,23 %
2	Penggunaan jasa advokat dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	91,67 %	92,31 %	8,33 %	7,69 %
3	Peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	100 %	88,46 %	-	11,54 %
4	Putusan hakim non-muslim pada proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	33,33 %	30,77 %	66,67 %	69,23 %
5	Putusan hakim wanita dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	50,00 %	46,15 %	50 %	53,85 %
6	Putusan hakim dengan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.	75,00 %	57,69 %	25,00 %	42,31 %

Dari data di atas, dapat diketahui, bahwa baik mahasiswa jurusan PHM maupun mahasiswa jurusan JS, memiliki pendapat yang sama terhadap setiap

indikasi faktor penegakan hukum acara pidana di pengadilan yang disajikan. Hanya saja, tidak setiap indikasi memiliki jumlah persentase yang sama tetapi perbedaan persentase sangat kecil untuk setiap jawaban yang setuju maupun tidak setuju. Namun dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat antara mahasiswa PHM dan JS.

Mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh masing-masing mahasiswa jurusan PHM dan JS, dapat kita lihat dari keterangan-keterangan pada bagian B bab IV pada tulisan ini sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa pada umumnya mahasiswa memiliki argumen yang sama.

Kalau diteliti secara terperinci, perbedaan antara mahasiswa jurusan PHM dan JS yaitu pada masalah peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan dan putusan hakim dengan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan. Dan hal inipun hanya masalah perbedaan jumlah persentase, namun secara keseluruhan mereka memiliki pendapat yang sama.

Untuk masalah peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan, perbandingan persentase jawaban setuju antara mahasiswa PHM dan JS masing-masing 100 % dan 88,46 %. Mahasiswa PHM seluruhnya setuju dengan peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan, sedangkan mahasiswa jurusan JS ada 11,54 % menjawab tidak setuju.

Adapun alasannya antara lain menurut Wiwik<sup>32</sup>: “Keberadaan saksi ahli terkadang bisa menyebabkan tidak tegaknya hukum karena mereka bisa dibayar oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Seorang saksi ahli dikhawatirkan menyampaikan hal-hal yang tidak benar (bohong).”

Pendapat ini ada karena pada realita kehidupan ada pihak saksi ahli yang tidak melakukan peranannya sebagaimana seharusnya. Sehingga mengakibatkan ada mahasiswa yang hilang kepercayaan pada peran saksi ahli.

Selanjutnya, perbedaan jumlah persentase tampak pada persoalan putusan hakim dengan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan. Perbandingan jumlah persentase antara mahasiswa PHM dan JS masing-masing yaitu: 75,00 % dan 57,69%. Selisih persentase perbandingan hanya sekitar 17 % saja. Namun pada umumnya masing-masing jurusan setuju dengan putusan hakim yang menggunakan minimal dua alat bukti dan ditambah keyakinannya.

Jadi, dapat diketahui, masing-masing mahasiswa dari jurusan PHM dan JS memiliki persepsi (pandangan) yang sama. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka, adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang keilmuan yang mereka miliki, yaitu mereka sama-sama memiliki basic ilmu keislaman yang di peroleh dari perkuliahan yang mereka jalani.

---

<sup>32</sup> Wiwik Soneta, Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Semester XI, *Wawancara*, Kampus Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 16 Januari 2009.

2. Walaupun berasal dari jurusan yang berbeda, ternyata masing-masing jurusan disajikan mata kuliah dasar yang sama dalam matakuliah-matakuliah hukum dasar, seperti ushul fiqh, fiqh, qawa'id fiqhiyah, dan matakuliah-matakuliah hukum Islam maupun hukum positif, seperti sejarah peradilan Islam, hukum acara pidana dan perdata, ilmu hukum, hukum pidana dan perdata dan lain sebagainya. Apalagi mereka juga sama-sama diwajibkan mengikuti praktek peradilan ke pengadilan negeri dan agama. Matakuliah-matakuliah dasar yang disajikan oleh pihak jurusan sama antara jurusan PHM dan JS, perbedaan matakuliah hanya pada spesifikasi mata kuliah jurusan (keahlian).<sup>33</sup>
3. Informasi mengenai pengetahuan tentang hukum acara pidana yang mereka peroleh umumnya sama, yaitu umumnya diperoleh dari matakuliah yang mereka pelajari, literatur, media elektronik, maupun dari penegak hukum itu sendiri. Namun mayoritas mahasiswa memperoleh informasi tentang proses penegakan hukum acara pidana dari literatur (buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana), untuk mahasiswa PHM sebanyak 8 dari 12 orang mahasiswa, dan pada jurusan JS sebanyak 17 dari 26 mahasiswa.<sup>34</sup>

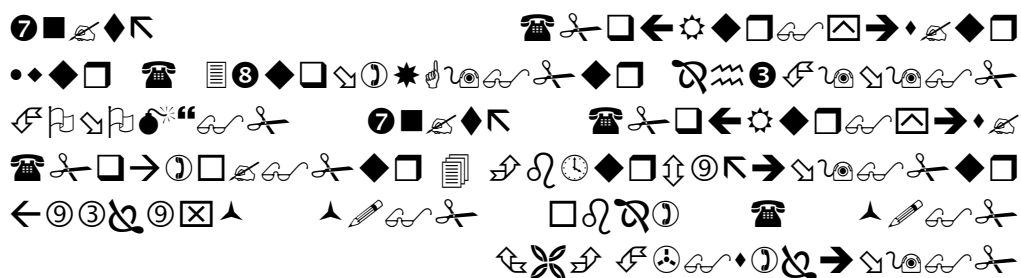
---

<sup>33</sup> Baca: Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab, *Bahan Kelengkapan Akreditasi*. (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2007), h. 15, Program Studi Jinayah Siyasah jenjang S1, *Evaluasi Diri*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, 2007. h. 26. dan Departemen Agama UIN SUSKA Riau, *Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2007/2008*. (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2007), h. 95-99.

<sup>34</sup> Data 2009: dari *Angket penelitian mahasiswa jurusan PHM dan JS*.

#### D. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa.

Islam menuntut adanya penegakan hukum dan kebenaran. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat sebagaimana maksud dan tujuan dari syari'at Islam (maqasidus syari'ah) yang diatur didalam al-Qur'an dan sunnah. Segala sesuatu yang membawa kemaslahatan dan benar menurut Islam, maka hal tersebut dianjurkan, dan sebaliknya, sesuatu yang tidak benar menurut hukum Islam maka harus dicegah sebagaimana sesuai dengan dalil sumber hukum Islam yaitu *dzari'ah*.<sup>35</sup> Jadi peran jaksa penuntut umum dalam upaya penegakan hukum pada hukum acara pidana juga dianjurkan karena pada dasarnya adalah untuk menegakkan kebenaran dan konsep *ta'awwun* (tolong-menolong). Mengenai konsep tolong menolong ini diatur di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yaitu:



<sup>35</sup> *Dzari'ah* secara etimologi adalah jalan yang menuju kepada sesuatu, ada juga yang mengartikan *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziah (691-751 H / 1292-1350 M) ahli fiqh Hanbali mengatakan: "Bahwa pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik diartikan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang yang disebut *sadd al-dzari'ah*, dan sesuatu yang dituntut untuk melaksanakan yang dituntut untuk dilaksanakan yang disebut dengan *fath dzari'ah*. Fath *dzari'ah* ini merupakan suatu perbuatan yang membuka kepada kebaikan, jadi segala hal yang membawa kepada kebaikan ini menjadi dianjurkan. Baca: Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke-1, h. 162.



Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>36</sup> {Q.S. al-Maidah (5) : 2}

Sebuah kaidah menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi jika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dlaruriyy* atau *ha’jiyy*).<sup>37</sup>

Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

الْأُمُورُ إِذَا ضَاقَتْ إِتَّسَعَتْ وَإِذَا اتَّسَعَتْ ضَاقَتْ

Artinya: “Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit, maka menjadi meluas. Apabila perkara-perkara itu telah meluas, maka kembali menyempit.”<sup>38</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum Islam

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 106.

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UIN Bandung, 1995), Cet. Ke-1, h. 74.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 75.

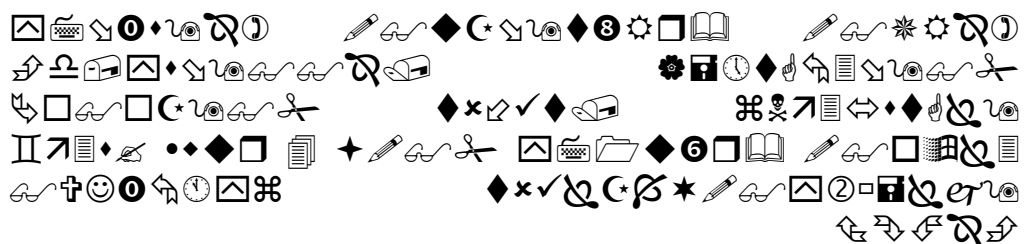
mempunyai tujuan, tujuan hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap pelaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. Bagian terbesar dalam penciptaan Allah adalah manusia karena manusia mempunyai kemungkinan untuk menerima peradaban dan kebudayaan (*al-tamaddun*). Dengan demikian, tidaklah Allah mengutus Rasul-rasul-Nya dan menurunkan wahyu-Nya selain untuk menegakkan keteraturan manusia.<sup>39</sup>

Mengenai peran advokat sebagai aparat penegak hukum, dalam pasal 1 ayat 2 UU No.18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat dapat memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Peran advokat sebagai pembela hak-hak kliennya harus tetap dalam rangka membela hak-hak klien dalam memperoleh keadilan, seperti pembelaan terhadap klien dalam membela haknya agar tidak dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya, tuduhan palsu dan hal-hal yang menzalimi klien dari keadilan. Menurut Bismar Siregar, dalam tema tulisannya: "*Fungsi dan tugas pengacara dalam penegakan hukum di Indonesia*", ia mengatakan: "Bahwa tugas pengacara haruslah dalam hal membantu klien menegakkan keadilan, memberi bantuan

---

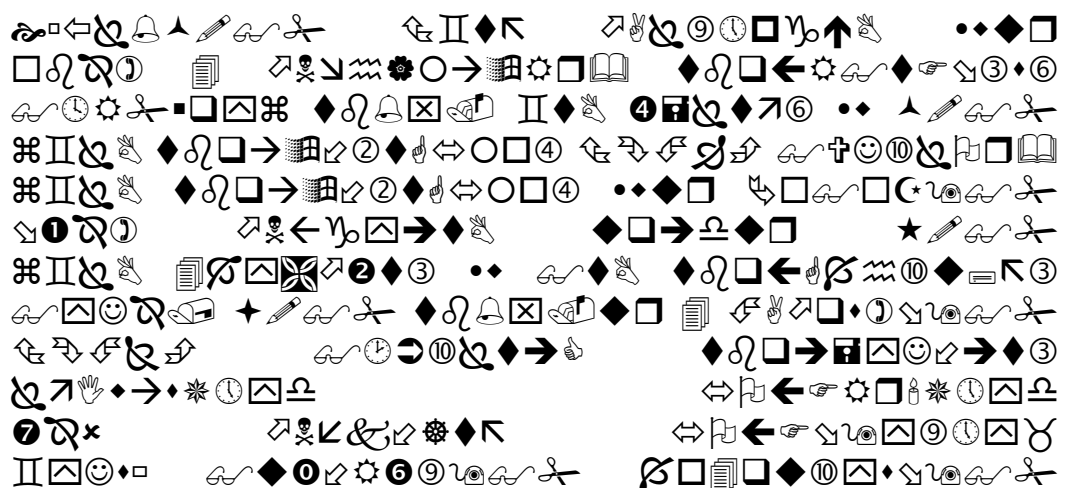
<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 99.

hukum, menegakkan dan memperjuangkan kebenaran”.<sup>40</sup> Seorang advokat dianjurkan untuk membela klien selama dalam rangka menegakkan kebenaran, namun jika sudah keluar dari tujuan ini, seperti membantu klien dalam rangka membela kesalahannya ini dilarang di dalam Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 105, yaitu:



Artinya: “Sungguhnya, Kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah di ajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat,”<sup>41</sup> {Q.S. an-Nisaa (4): 105}

Juga surat an-Nisaa ayat 107-109, yaitu:



<sup>40</sup> Bismar Siregar, *Bunga rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 2*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989. Cet. Ke-1, h. 111-112.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 95.



Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguhny, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai-Nya. Dan adalah Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu! kamu berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap azab Allah)?”<sup>42</sup> {Q.S. an-Nisaa (4): 107-109}

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَمْرَاءِ،  
وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ. لِيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ  
كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَذِبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا  
عَلَى شَيْءٍ. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya Beliau bersabda: ‘Kecelakaanlah bagi pera *pemimpin*, kecelakaanlah bagi *para informan*, dan kecelakaanlah bagi *orang-orang kepercayaan*. Sungguh pada hari kiamat nanti, akan ada orang-orang yang rambut kepangan mereka bergantung pada binatang-binatang, sehingga mereka bergelantungan di antara langit dan bumi, dan mereka belum melakukan suatu apapun.”<sup>43</sup> (H.R. Ahmad)

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 96.

<sup>43</sup> Al-Imam asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 4, h. 650.

Sabda Beliau (kecelakaan bagi informan), disebutkan dalam *an-Nihayah*: Yaitu orang yang mengetahui berbagai perkara kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok manusia, ia memegang perkara mereka, dan pemimpin mencari tahu berita mereka darinya. Sebab ancaman ketiga golongan ini, yakni para pemimpin, para informan, dan orang-orang kepercayaan, karena mereka menerima dan mematuhi berdasarkan apa yang diberikan kepada mereka, bila para pemimpin berbuat zalim terhadap rakyat, merekapun melakukannya (seiring dan seirama) karena mereka mampu melakukannya. Itulah penyebab kerasnya siksaan bagi mereka.<sup>44</sup>

Adapun mengenai peran dan kedudukan saksi ahli, sama prinsipnya dengan kedudukan jaksa penuntut umum dan advokat yang berperan sebagai aparat penegak hukum. Peran saksi ahli sangat dianjurkan di dalam Islam dalam rangka penegakan hukum, namun ketika peran ini tidak difungsikan sebagaimana tujuan awal dari saksi ahli ini yaitu sebagai bagian dari penegak hukum, maka Islam merupakan penentangannya yang utama.

Kesaksian para ahli dalam peradilan disebut juga dengan *bayyinah*. Menurut Ibnul Qayyim, bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahadah* adalah mengemukakan syahadah atau kesaksian untuk mendapatkan hak atas orang lain. Para fuqaha menerangkan syarat-syarat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 653.

yang wajib sempurna pada kesaksian maka kesaksian itu harus diterima dan mesti dipergunakan.<sup>45</sup>

Bahkan, Imam Malik membolehkan dokter-dokter yang bukan beragama Islam menjadi saksi bagi orang Islam apabila tidak diperoleh dari orang Islam sendiri.<sup>46</sup> Memberikan kesaksian untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran sangat dianjurkan, sebagaimana hadits Rasulullah berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.  
(راوه احمد و مسلم و ابو داود و ابن ماجه)

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid al-Juhaniy, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? Yaitu yang menyampaikan kesaksiannya, sebelum ditanyakan kepadanya.”<sup>47</sup> (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hal ini yaitu seseorang yang menyaksikan hak orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, lalu ia datang memberitahunya bahwa ia sebagai saksi baginya, karena hal itu sebagai amanat baginya terhadap orang tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hashbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riezki Putera, 1997), Cet. Ke-2, h. 139.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>47</sup> Al-Imam asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 686.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 686.

Adapun mengenai masalah keyakinan (agama) seorang hakim, menurut Jumhur Ulama, keislaman itu adalah syarat bolehnya menjadi saksi atas seorang muslim. Oleh karena itu, hakim yang bukan muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim. Karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula dipandang cakap untuk menjadi hakim.

Tugas peradilan dalam Islam tidak boleh dilaksanakan selain orang, hal ini disebutkan dalam surat an-Nisaa ayat 141 yaitu:



Artinya: “... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”<sup>49</sup> {Q.S. an-Nisaa (4): 141}

Namun, golongan Hanafiyah membolehkan mengangkat orang yang bukan muslim untuk memutuskan perkara orang yang bukan muslim. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Abidin bahwa diperkenankan melantik qadhi khusus untuk golongan *dzimmah* untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka alami, sebab hal ini tidak mendatangkan mudharat bagi orang-orang Islam.<sup>50</sup>

Masalah peradilan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena melalui peradilan hukum syara’ dapat ditegakkan. Maka syarat qadhi

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 101.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, h. 22.

dalam lembaga peradilan harus beragama Islam, hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i yang dengan tegas menolak qadhi non-muslim untuk menyelesaikan perkara orang-orang Islam dan kalangan non muslim, jika ini terjadi, maka terpecahlah dengan sendirinya.<sup>51</sup>

Kata hakim itu sendiri berasal dari kata hikmah yang artinya kebijaksanaan, jadi berarti hakim adalah seseorang yang bijaksana (memiliki hikmah / kebijaksanaan), adapun pengertian hikmah itu sendiri menurut Malik, kata hikmah dalam al-Qur'an umumnya berarti:<sup>52</sup>

أَلْفَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ بِهِ

Artinya: "Memahami agama Allah serta mengamalkannya."<sup>53</sup>

Sementara itu Syafi'i dan al-Thabariyy mengartikan hikmah sebagai sunnah Rasulullah.<sup>54</sup> Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 34 berikut:<sup>55</sup>



<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>52</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, h. 3.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 422.



Artinya: “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu)”... {Q.S. al-Ahzab (33): 34}

Jadi dapat dipahami bahwa hikmah merupakan hak umat Islam. Selain itu Indra<sup>56</sup> juga berpendapat: “Bahwa perbedaan agama akan berpengaruh pada emosi dan perasaan seorang hakim dalam menghasilkan keputusan yang profesional dan adil.”

Mengenai kedudukan hakim wanita dalam proses penegakan hukum acara pidana, menurut pendapat Malik, asy-Syafi’i, dan Ahmad, bahwa tidak sah wanita menjadi hakim.<sup>57</sup> Laki-laki merupakan syarat syah untuk dapat diangkat menjadi qadhi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 34, yaitu:



Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan),”<sup>58</sup> {Q.S. an-Nisaa (4): 34}

Juga hadits dari Abi Bakhras berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ  
قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

<sup>56</sup> Indra Mahdi, Mahasiswa Jinayah Siyasa (JS), semester IX, Wawancara, Panam, 12 Januari 2009.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, h.24.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 84.

(راوه احمد و البخارى و الترمذى و صححه)

Artinya: “Dari Abu Bakhrah ia mengatakan, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang persia mengangkat Puteri Kisra sebagai pemimpin mereka, Beliau bersabda: “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”<sup>59</sup> (H.R. Ahmad, al-Bukhari, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya).

Menurut Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana dan qishash. Mereka mengecualikan yang dua ini karena persaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua bidang ini. Menurut mereka, hukum menjadi qadhi sama dengan hukum menjadi saksi. Maka dalam perkara-perkara wanita dapat menjadi saksi, dapat pula menjadi hakim.<sup>60</sup> Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala rupa perkara. Wanita dapat menjadi mufti dalam segala rupa masalah, karena itu dapat pula menjadi hakim dalam segala rupa masalah.<sup>61</sup>

Bagi ath-Thabari tujuan pengangkatan qadhi adalah melaksanakan keadilan, karena itu jabatan qadhi dapat diberikan kepada siapapun yang mampu menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang bertikai.<sup>62</sup> Meskipun demikian, pendapat yang menyatakan ath-Thabari telah membenarkan perempuan menjadi qadhi ditolak oleh Abdu al-Utwah. Menurutnya, pihak yang menyatakan

---

<sup>59</sup> Imam asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 653.

<sup>60</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, h. 43.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>62</sup> Mahdini, *Syarat menjadi Qadhi menurut Tsamarat al-Muhimah (Jurnal Hukum Islam)*, (Pekanbaru: Fakultas Syari’ah IAIN Sulthan Syarif Qasim, 2003), Volume 8 No. 6 Juni 2003, h. 18.

demikian tidak menyatakan sumber rujukan, apakah itu benar-benar dinyatakan oleh ath-Thabari. Bahkan menurut al-Uthwah, kata-kata itu berasal dari Abu Bakar Ibn al-Arabi dan dia tidak pula menyandarkan pendapat itu kepada Ath-Thabari. Selain itu, ath-Thabari bukanlah seorang fuqaha sehingga bukanlah hasil ijma' dan pendapatnya tidak dapat dinyatakan sah.<sup>63</sup> Juga al-Hakim berkata, hakim perlu berbicara dengan orang laki-laki, sedangkan perempuan diperintahkan untuk menghindarinya (berdiskusi dengan laki-laki).<sup>64</sup>

Adapun tinjauan Hukum Islam mengenai putusan dengan dua alat bukti dan keyakinan (pengetahuan) hakim ini adalah sebagai berikut:

a. Alat Bukti.

Para ulama telah bersepakat, bahwa apabila seorang penggugat dapat mengajukan dua orang saksi mengenai gugatannya dan kesaksian keduanya diterima, maka gugatannya dapat diterima. Akan tetapi jika dia tidak dapat mengajukan bukti dan meminta supaya tergugat disumpah, dan jika tergugat mau bersumpah, maka gugatannya ditolak.<sup>65</sup> Namun mereka berbeda pendapat mengenai bisa diterima atau tidaknya suatu gugatan penggugat jika penggugat hanya menghadirkan satu saksi dan ditambah dengan sumpah penggugat.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>64</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Terjemahan Kifyatul Akhyar (Kelengkapan orang shalih) Bagian 2*. (Surabaya: Bina Iman, th), h. 538.

<sup>65</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2000), Cet. Ke-1, h. 251.

Menurut Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin bin al-Husain Radhiallahu anhum, az-Zahiri, an-Nakha'i Ibnu Syibramah, Imam Yahya, Imam Abu Hanifah, dan sahabat-sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh diterima gugatan seorang saksi ditambah sumpah penggugat.<sup>66</sup> Adapun alasannya adalah qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara

*kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada),..*<sup>67</sup>

{Q.S. al-Baqarah (2): 282}

Sedangkan yang berpendapat boleh diterima gugatannya itu ialah segolongan sahabat radiallahu anhum, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka, diantaranya Khulafa'ul Rasyidun (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiallahu anhum), Ibnu Abas, Umar bin Abdul Azzis, Syuraih, asy-Sya'bi, ahli-ahli fiqh Madinah, Imam Maliki, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Rahimahullah.<sup>68</sup> Adapun alasannya adalah bahwa Rasulullah SAW

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 251.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 48.

<sup>68</sup> Mahmud Syalthut, *loc.cit.*

pernah memutuskan perkara dengan seorang saksi ditambah sumpah.<sup>69</sup>

Adapun hadistnya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَيْنِ وَ شَهْدٍ .

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a., Rasulullah SAW menetapkan keputusan perkara dengan *sumpah* dan *saksi*.”<sup>70</sup> (H.R. Muslim)

Juga Hadits dari Ummu Salamah berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلْبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرَهَا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., isteri Nabi SAW: Rasulullah SAW pernah mendengar suara ribut karena pertengkaran di dekat pintu beliau. Kemudian Beliau keluar menemui mereka dan bersabda: ‘Aku ini hanyalah manusia biasa, dan banyak orang yang mengadukan perkaranya padaku, mungkin ada salah satu pihak yang pandai menyampaikan *argumentasinya* dari pada lawannya sehingga aku mengira dialah yang benar, lalu akupun

<sup>69</sup> Ibid. h. 254.

<sup>70</sup> Al-hafizh Zaki al-Din ‘abd al-‘Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terjemahan: Mukhtashar Shahih Muslim terbitan al-Maktab al-Islam Beirut*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2004), Cet. Ke-2. h. 574.

memenangkannya. Oleh karena itu, barang siapa aku menangkan (karena kepandaianya menyampaikan argumentasi padahal dialah yang bersalah) untuk mendapatkan seorang muslim lainnya, sungguh, yang ia ambil itu hanyalah sepotong api neraka. Kemudian terserah padanya, apakah dia akan mengambilnya atau meninggalkannya.”<sup>71</sup> (H.R. Muslim)

Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga memutuskan perkara dengan dua alat bukti, yaitu sumpah dan saksi, bahkan pada hadits dari Ummu Salamah di atas, Rasulullah memutuskan perkara hanya dengan mendengarkan argumentasi dari orang-orang yang berperkara. Adapun menurut Sulaiman Rasyid, dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dirincikan sebagai berikut:

1. “Hukuman terhadap orang yang berzina, saksi untuk menjalankan hukum zina tidak diterima selain apabila sampai empat orang laki-laki.
2. Hukuman karena minum arak, merampok, riddah dan sebagainya diterima dengan dua orang saksi laki-laki.
3. Diterima saksi seorang laki-laki saja yaitu saksi untuk melihat bulan.
4. Hal yang bersangkutan atau tujuan harta seperti hutang piutang, jual beli, rampasan dan sebagainya, hal ini diterima dengan dua orang saksi laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan, dan satu saksi laki-laki dan sumpah yang mendakwa.
5. Hal yang bukan harta dan tidak bertujuan pada harta, sedang hal itu biasanya dapat dilihat oleh laki-laki seperti perkawinan, perceraian, habisnya iddah, thalaq, tebus, berwakil, berwasiat, mati dan sebagainya, saksi di sini tidak diterima selain saksi laki-laki.
6. Sesuatu yang biasanya tidak dapat dilihat oleh laki-laki, hanya yang biasanya dilihat oleh perempuan, seperti melahirkan, menyusui, haid, cacat perempuan, gadis atau tidaknya, dan lain sebagainya, di sini tidak diterima menjadi saksi selain empat orang perempuan.”<sup>72</sup>

b. Keyakinan (pengetahuan hakim)

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 573.

<sup>72</sup> Baca: Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), Cet. Ke-20, h. 531-533.

Masalah keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh fuqaha. Demikian itu karena ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya *dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain*. Apabila saksi-saksi memberikan kesaksian yang berlawanan dengan pengetahuannya, maka hakim tersebut tidak boleh memvonis berdasarkan pengetahuannya itu. Seorang hakim juga dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam pengakuan lawan atau pengingkarannya. Kecuali Malik yang berpendapat bahwa hakim harus mendatangkan dua orang saksi, bagi pengakuan lawan atau pengingkarannya.<sup>73</sup> Ulama juga sepakat bahwa hakim dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya *dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak yang lain*, jika hal ini tidak terjadi perselisihan. Namun mereka berbeda pendapat apabila persoalan tersebut terdapat perselisihan.<sup>74</sup>

Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan segolongan fuqaha, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya. Sedangkan menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis

---

<sup>73</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 703.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 703.

perkara atas seseorang berdasarkan pengetahuannya tanpa adanya saksi dan pengakuan. Pendapat ini dipengang juga oleh Ahmad dan Syuraih.<sup>75</sup>

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengecualikan perkara yang dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan pengetahuannya. Menurut mereka *dalam perkara hudud, hakim tidak boleh memvonis perkara hudud itu berdasarkan pengetahuannya*. Tetapi dalam masalah lain hal itu dibolehkan.<sup>76</sup>

Abu Hanifah juga mengecualikan pengetahuan hakim yang dipakai untuk memvonis berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh pada saat mengadili, dan bukan berdasarkan yang ia ketahui sebelum mengadili. Sedangkan menurut segolongan pengikut Malik, hakim boleh memvonis berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh dalam majelis peradilan. Yakni berdasarkan sesuatu yang ia dengar, meski tidak ada seorangpun yang menyaksikan demikian di hadapannya.<sup>77</sup>

Pendapat Mughirah lebih sejalan dengan aturan-aturan pokok. Sebab, dasar peradilan dalam syari'at seorang hakim tidak boleh memvonis perkara kecuali berdasarkan dalil, meski dugaan kuat yang diperoleh dari dalil tersebut lebih kuat dari pada dugaan yang diperoleh berdasarkan kejujuran dua orang saksi.<sup>78</sup> Hakim boleh menggunakan keyakinannya apabila keyakinan itu

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 704.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 706.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 707.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h.707.



diperoleh pada saat pemeriksaan perkara, namun hakim tidak boleh hanya menggunakan keyakinannya ini secara mutlak.<sup>79</sup>

Apabila timbul suatu perkara yang memerlukan ijtihad, maka hakim dapat menemukan sesuatu hukum dengan ijtihadnya.<sup>80</sup> Apabila hakim memutuskan perkara lalu memenangkan salah seorang berdasarkan keterangan-keterangan menurut lahirnya telah mencukupi, maka menurut nukilan Asy-Syaukany bahwa jumhur ulama dan Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah menetapkan bahwa putusan hakim tersebut hanya berlaku pada lahirnya (formal) saja, tidak pada batinnya. Karena itu, tidaklah halal bagi orang yang dimenangkan itu memiliki barang yang menurut putusan telah menjadi haknya baik berupa harta, berupa akad, ataupun mengenai fasakh dan milik. Sebagian para fuqaha membedakan antara harta dengan yang lain. Kalau yang diputuskan itu harta, maka putusan itu berlaku pada lahirnya saja.<sup>81</sup> Menurut Ibnu Hazm Adh-Dhahiri, hakim wajib menjatuhkan putusan atas dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam hukum qishash, had dan perzinaan baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim,<sup>82</sup> berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

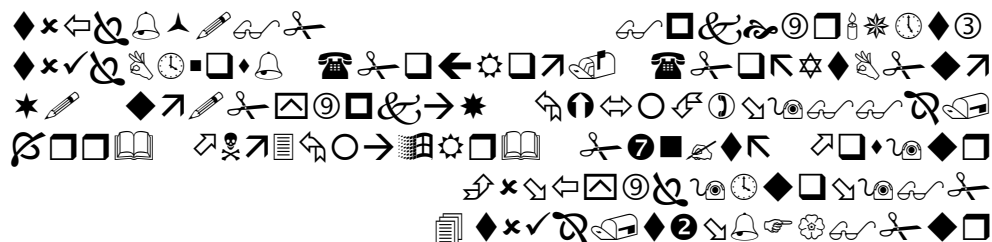
---

<sup>79</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, Baca: h. 162.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>82</sup> Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 116.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”<sup>83</sup>

{Q.S. an-Nisaa (4): 135}

Dan tidak dapat dikatakan adil manakala hakim mengetahui bahwa salah satu pihak yang berperkara itu berbuat dhalim terhadap pihak lain, kemudian ia membiarkan masing-masing pada kedudukannya, sebagaimana sabda Nabi berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

Artinya: “Barang siapa diantara kamu mengetahui tindakan kemungkaran maka cegahlah dengan alat kekuasaan yang ada padanya”.<sup>84</sup>

Mengenai hakim yang memutuskan hanya berdasarkan pengetahuan sendiri dijelaskan pada hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ بْنُ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَا حَهِ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضْرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّه. فَاتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَ كَذَا. فَلَمْ

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 100.

<sup>84</sup> Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 117.

يَرْضَوْا. فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا. فَرَضُوا. فَقَالَ: إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَ مُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَ كَذَا فَرَضُوا. أَفَرَضَيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا. فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْفُوا، فَكَفُوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَزَادَهُمْ. وَقَالَ: أَفَرَضَيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ فَقَالَ:

أَفَرَضَيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. (رواه لخمسة الا الترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah r.a., bahwasaya Rasulullah SAW mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai petugas pemungut zakat, lalu seorang laki-laki menolak memberikan zakatnya, maka Abu Jahm memukulnya sehingga melukainya. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW lalu berkata, Qishash wahai Rasulullah. Beliau berkata, bagi kalian sekian dan sekian. Namun mereka tidak rela, Beliauapun berkata lagi, bagi kalian sekian dan sekian. Merekaapun rela. Kemudian Beliau berkata, aku akan berbicara pada orang-orang dan menyampaikannya kepada mereka tentang kerelaan kalian. Mereka menjawab, ya. Beliauapun berpidato kemudian beliau berkata, mereka itu orang-orang yang datang kepadaku menuntut qishash, lalu aku tawarkan kepada mereka sekian dan sekian merekaapun rela, apakah kalian rela? Mereka menjawab, tidak. Maka Kaum Muhajir hendak menyerang mereka, namun Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar menahan diri, merekaapun menahan diri. Kemudian Beliau memanggil mereka dan menambahkan kepada mereka, lalu berkata, apakah kalian rela? Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau berkata aku akan berbicara kepada orang-orang dan memberitahu mereka tentang kerelaan kalian. Mereka menjawab, ya. Kemudian Beliauapun berpidato lalu berkata, Apakah kalian rela? Mereka menjawab, ya.”<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Al-Imam asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 676.

Para ilmu berbeda pendapat mengenai bolehnya hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Asy-Syafi'i mengatakan, "Seandainya tidak ada hakim-hakim yang buruk, tentu aku akan mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri." Hadits Aisyah ini menceritakan pemberitahuan Nabi SAW tentang kerelaan mereka yang menuntut qishash, dan mereka tidak menghukum mereka yang tidak mengakui kerelaan yang pernah dinyatakan.<sup>86</sup>

Al-Bukhari mengisyaratkan kepada ucapan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa hakim boleh memutus berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hak-hak manusia, namun hakim tidak boleh memutus menurut pengetahuannya sendiri mengenai hak-hak Allah, seperti mengenai hudud. al-Karabisi mengatakan, menurutku bolehnya hakim memutus berdasar pengetahuannya sendiri adalah hakim yang dikenal shalih, jujur, dan memelihara kesucian dirinya, tidak pernah diketahui melakukan kesalahan besar dan tidak pernah tertuduh dengan tuduhan buruk, sehingga faktor-faktor ketakwaan ada padanya.<sup>87</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa persepsi mahasiswa dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana ini sejalan dengan hukum Islam, hanya saja yang menjadi pada masalah peran hakim wanita dalam masalah penegakan hukum pidana di pengadilan baik mahasiswa PHM maupun JS,

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 678.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 678.

persentase setuju dan tidak setuju pada jurusan ini rata-rata sama besar untuk jawaban setuju dan tidak setuju, padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa untuk perkara pidana ulama sepakat bahwa hakim harus laki-laki.

Selain itu, menurut mahasiswa masalah penegakan hukum ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukumnya. Menurut mereka, pada dasarnya hukum telah mengatur ketentuan-ketentuan agar bisa menerapkan peraturan secara adil. Tidak tegaknya keadilan oleh aparat penegak hukum oleh aparat penegak hukum (jaksa penuntut umum, advokat, saksi ahli, hakim) umumnya disebabkan bukan karena lemahnya peraturan hukum, namun karena para penegak hukum tidak melakukan kinerjanya dengan baik, bahkan sengaja melakukan kejahatan dengan kecurangan-kecurangannya. Kecurangan-kecurangan ini umumnya disebabkan karena 'suap-menyuap'. Realita suap menyuap ini sangat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Suap-menyuap ini juga menyebabkan aparat penegak hukum bersikap 'tebang pilih' terhadap para pelaku kejahatan.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga di atas, bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, namun juga dipengaruhi oleh undang-undang yang berlaku. Mengenai lemahnya penegakan hukum karena disebabkan undang-undangnya menurut mahasiswa faktor ini tidak begitu besar. Adapun menurut penulis, undang-undang juga sangat mempunyai pengaruh besar dalam upaya penegakan hukum di samping aparat penegak hukum. Hukum peradilan yang berlaku di pengadilan negeri adalah

hukum positif, sebagai umat Islam, kita harus berupaya menjalankan hukum sesuai syari'at Islam, namun dengan berbagai keterbatasan kita, kita belum bisa menegakkan syari'at Islam itu.

Menurut penulis, saat ini walaupun hukum yang berlaku di pengadilan negeri belum hukum Islam, tapi kita berupaya supaya aturan-aturannya mengandung nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muslim kita harus selalu meningkatkan keimanan dan kemampuan intelektualitas kita sehingga bisa melakukan hal ini. Kita harus mengerti mengenai *politik hukum*<sup>88</sup>, dan bagian-bagiannya.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan. Peran pemerintah ini antara lain melalui fungsi pembangunan, pembinaan dan pengawasan hukum secara sadar dan berkelanjutan. Hal ini adalah dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, bersih dan berwibawa. Selain itu, materi hukum yang ditegakkan itu harus diupayakan mencerminkan cita-cita masyarakat mengenai kebenaran dan keadilan.

Upaya penegakan hukum juga dapat diwujudkan dengan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat oleh pemerintah misalnya dengan proses sosialisasi melalui media komunikasi seperti televisi, radio, internet, majalah,

---

<sup>88</sup> Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sunarto, 1983: 20, di dalam: Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. Ke-1, h. 1.

koran dan media komunikasi lainnya. Proses informasi pendidikan ini melibatkan media komunikasi khususnya kalangan pers sebagai penyampai informasi, sehingga perkembangan hukum dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat untuk dijadikan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pers yang luas dan tertib hukum juga menjadi suatu kemestian.

Di seluruh dunia, juga di negara Indonesia kita tercinta ini, setiap kebijakan baru berlaku bila sudah mempunyai kekuatan hukum, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hukum dan politik, merupakan dua kata yang sangat menentukan dan berpengaruh pada kehidupan kita diseluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, kita harus sangat paham tentang masalah ini supaya kita bisa menegakkan nilai-nilai dan aturan-aturan Islam sebagaimana perintah Allah SWT sehingga rahman dan rahim Allah SWT terlimpah di dunia ini, khususnya di negara Indonesia kita tercinta ini.

Oleh sebab itu, setiap kita harus berperan dalam upaya penegakan keadilan. Penegakan hukum bisa diupayakan melalui lembaga peradilan. Setiap hukum harus mencerminkan rasa keadilan, karenanya setiap hukum harus sesuai dengan syari'at atau aturan Islam. Karena Islam adalah sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum.<sup>89</sup>

Karena penegakan hukum adalah perintah Allah, maka kita harus berupaya melakukannya. Kewajiban menegakkan hukum tidak boleh kita

---

<sup>89</sup> Ahmad Bahiej, dkk. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), Cet. Ke-1, h. 175.

serahkan pada aparat yang resmi saja, tapi kita sebagai umat Islam harus turut serta mewujudkannya. Sebagai masyarakat, kita harus berpartisipasi, minimal sebagai pengamat yang dapat menjadi pengontrol dalam tegaknya keadilan. Kita tidak boleh buta dengan permasalahan-permasalahan umat dan bangsa. Apalagi kita sebagai generasi intelektual muda muslim tentunya harus lebih banyak yang kita lakukan. Kita harus menjadi solusi, sehingga Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dapat kita wujudkan. *Wallahu'alam bishawwab.*

















































































































































































































































































## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN.**

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) dan Jinayah Siyasah (JS) memiliki persepsi yang sama dalam masalah proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan. Sebagian besar mahasiswa setuju dengan peran jaksa penuntut umum, advokat, dan saksi ahli sebagai aparat penegak hukum di pengadilan dengan hasil persentase rata-rata diatas 80%. Mereka juga sama-sama tidak setuju dengan peran hakim non muslim dan hakim wanita dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
2. Persamaan persepsi mereka disebabkan (dipengaruhi) kesamaan beberapa matakuliah dasar yang mereka pelajari di masing-masing jurusan.
3. Persepsi mahasiswa PHM dan JS terhadap proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan sudah sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada persepsi mereka yang tidak setuju dengan peran hakim non-muslim dan hakim wanita dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan.

#### **B. SARAN**

1. Dalam masalah upaya penegakan hukum, umumnya mahasiswa menilai bahwa penghambat penegakan hukum terletak pada aparatnya, padahal undang-undang juga berpengaruh pada proses penegakan hukum. Oleh sebab itu diharapkan

kepada mahasiswa PHM dan JS supaya juga memberi perhatian khusus pada masalah perundang-undangan.

2. Untuk masing-masing jurusan, supaya lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang undang-undang, pembuatan dan fungsi undang-undang tersebut seperti melalui seminar, pelatihan, talk show hukum dengan para ahli hukum, anggota legislatif dan aparat penegak hukum. Khususnya untuk jurusan Jinayah Siyasah, pengadaan mata kuliah Politik Hukum baik bagi peningkatan kualitas mahasiswa sebagai modal bagi sarjana hukum Islam yang akan berkecimpung dalam masalah politik salah satunya sebagai anggota parlemen yang berperan membuat undang-undang, sehingga minimal bisa menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang tersebut.
3. Dengan keilmuan yang dimilikinya, diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap persoalan umat dan bangsa terutama bisa menjadi bagian dari pelaku penegak hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Nul-Karim.*

Adam, SH., Prof. Aswarni & Zulfikri, S.H., M.H. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia.* 2006. Pekanbaru: Alaf Riau.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Syaihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar (Ibnu Hajar al-Asqalani). *Ringkasan Targhib wa Tarhib.* 2006. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Terjemahan Kifyatul Akhyar (Kelengkapan orang shalih) Bagian 2.* Tt. Surabaya: Bina Iman.

Al-Mundziri, Al-hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim (terjemahan: Mukhtashar Shahih Muslim terbitan al-Maktab al-Islami, Beirut).* 2004. Bandung: Mizan Media Utama. Cet. Ke-2.

ANTARA. *Muslim Dituntut Beri Bukti Kesempurnaan Islam Pada Dunia.* 30/05/08 23:45.

Arief, S.H, Prof. Dr. Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* 1998. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arifin, S.H., Prof. Dr. H. Bustanul. *Masa Lampau Yang Belum Selesai, Percikan Pikiran tentang Hukum & pelaksanaan Hukum.* 2007. Jakarta: O.C. Kaligis Associates.

Ash-.Shiddieqy, Teungku Muhammad Hashbi *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* 1997. Semarang: PT. Pustaka Riezki Putera. Cet. Ke-2.

Ash-Shiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum.* 2004. Pekanbaru: Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR. Volume: 15 Oktober.

Asy-Syaukani, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar.* 2007. Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Terjemahan al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' al-Shahih (Ringkasan Shahih al-Bukhari).* 2004. Bandung: Mizan Media Utama. Cet. Ke-11.

Bahiej, Ahmad, dkk. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer.* 2006. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.

- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. 2004. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Departemen Agama UIN SUSKA Riau, *Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2007/2008*. 2007. Pekanbaru: UIN SUSKA.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. 2005. Jakarta : Prenada Media.
- Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska RIAU. *Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*. 2007. UIN SUSKA RIAU.
- Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. 2004. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hadikusuma, S.H, Prof. H. Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. 2005. Bandung: PT. Alumni. Cet. Ke-3.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. 2001. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 3*, (Terjemahan: *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. 2002. Jakarta: Pustaka Amani. Cet. Ke-2.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Terjemahan: Muktashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh, Ringkasan Kitab al-Umm Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azam. Cet. ke-3.
- Khallaf, Muhammad Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. 2000. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-7.
- Kusumah, Mulyana W. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. 1986. Jakarta : CV. Rajawali.
- . *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi)*. 2002. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Cet. Ke-2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. 1995. Jakarta: Titik terang.

- KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). UU No. 8 Tahun 1981. 1995. CV. Titik Terang.
- Mahdini, *Syarat menjadi Qadhi menurut Tsamarat al-Muhimah (Jurnal Hukum Islam)*. 2003. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim. Volume 8 No. 6 Juni 2003.
- Madkur, Muhammad Salam. *Terjemahan: al-Qodho'u fil Islam (Peradilan dalam Islam)*. 1993. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet. Ke-4.
- Mahfud MD, SH., MH, Dr. Moh. *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI (Mengenang almarhum Prof. Dr. Komar Kanta Atmadja, SH, LL. M)*. 1998. Bandung: Angkasa Bandung. Cet. Ke-1.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. 2007. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. *Penegakan Hukum Yang Profesional*. 2005. Pekanbaru: Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR. Volume: 16 April.
- Martius, Surawan. *Kamus Kata Serapan*. 2001. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Terjemahan: Muktasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh (Ringkasan Kitab al-Umm)*. Jakarta: Pustaka Azam. Jilid 2. Cet. Ke-3.
- Muhammad, S.H., Prof. Abdul Kadir *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. Ke-3.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*. 1988. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Cet. ke-1.
- Praja, Dr. Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. 1995. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UIN Bandung.
- Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab, *Bahan Kelengkapan Akreditasi*. 2007. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
- Program Studi Jinayah Siyasah jenjang S1. *Borang Akreditasi*. 2007. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

- Program Studi Jinayah Siyasah jenjang S1. *Evaluasi Diri*. 2007. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.
- Ramelan, S.H. M.H. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. 2006. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 1987. Bandung: Sinar Baru. Cet. Ke-20.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2006. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet. Ke-1, Jilid 4.
- Siregar, Bismar. *Bunga rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 2*. 1989. Jakarta: CV. Rajawali. Cet. Ke-1.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: UI-Press.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1986. Jakarta: CV. Rajawali. Cet. Ke-2.
- Sumarno, Kohar Hari, S.H. *Hukum dan Ketahanan Nasional (Dari Pengalaman Seorang Jaksa)*. 1986. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sunarso, Siswanto, Dr. H. S.H., M.H. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2005. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syalhuth, Prof. Dr. Mahmud *Fiqh Tujuh Mazhab*. 2000. Bandung: CV. Pustaka setia.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. 1995. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. Ke-4.
- UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- UU Republik Indonesia No. 15 tahun 1961 tentang: *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan* tanggal 30 Juni 1961.
- UU No. 8 Tahun 1981. KUHAP (*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*), CV. Titik Terang, 1995.
- UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Klasifikasi Populasi Berdasarkan Semester dan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 2	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Semester dan Jenis Kelamin.....	78
Tabel 3	: Jawaban Responden Terhadap Pelaksanaan Proses Penyampaian Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	79
Tabel 4	: Jawaban Responden Terhadap Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Penegakan hukum Acara Pidana.....	83
Tabel 5	: Jawaban Responden Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Proses Penegakan hukum Acara Pidana.....	85
Tabel 6	: Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim Non-muslim dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana.....	87
Tabel 7	: Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim Wanita dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana.....	90
Tabel 8	: Jawaban Responden Terhadap Putusan Hakim dengan Dua Alat Bukti dan Satu Keyakinan Dalam Proses Penegakan Hukum Acara Pidana.....	92
Tabel 9	: Rekapitulasi Persentase Jawaban Mahasiswa.....	94



ANGKET PENELITIAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Nama :  
Jurusan / Semester :  
Nim :  
Tempat/tgl :

A. Petunjuk Pengisian

- Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah.
- Berilah tanda (X) pada salah satu huruf, a, b, atau c yang saudara anggap benar.
- Berilah jawaban isian sesuai dengan pendapat anda.
- Setelah diisi, angket penelitian ini harap dikembalikan.
- Kejujuran dan kesungguhan saudara dalam menjawab angket ini mempengaruhi penelitian kami dalam mengumpulkan data yang ada.

B. Pertanyaan.

**PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN**

1. Selain dari mengikuti mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan, dari mana saja anda memperoleh pengetahuan tentang hukum acara pidana?
  - a. Dari literatur (buku, jurnal, koran, majalah)
  - b. Dari Media elektronik (situs online/Internet, televisi, radio)
  - c. Dari penegak dan pelaku hukum acara pidana (polisi, hakim, jaksa, advokat, tersangka, terdakwa)
2. Dalam hukum acara pidana, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari lembaga kejaksaan (bukan oleh pendakwa sendiri), bagaimana menurut anda?
  - A. Setuju.
  - B. Tidak setuju.

3. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju

.....  
.....  
.....

4. Dalam upaya penegakan hukum pidana, seorang terdakwa bisa menunjuk kuasa hukum (advokat) bahkan pada perkara pidana yang terancam lima tahun penjara harus memiliki kuasa hukum, bagaimana menurut anda?

- a. Setuju.
- b. Tidak setuju.

5. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju

.....  
.....  
.....

6. Bagaimana pendapat anda mengenai keberadaan saksi ahli dalam proses upaya penegakan hukum acara pidana ?

- a. Setuju.
- b. Tidak Setuju.

7. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju

.....  
.....  
.....

8. Setujukah anda penyelesaian perkara pidana jika dilakukan oleh hakim yang bukan muslim?
- a. Setuju.
  - b. Tidak setuju

9. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju
- .....
- .....
- .....

10. Setujukah anda penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh hakim wanita?
- a. Setuju.
  - b. Tidak Setuju.

11. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju
- .....
- .....
- .....

12. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya, setujukan anda?
- a. Setuju.
  - b. Tidak Setuju.

13. Sebutkan alasan anda mengapa menjawab setuju atau tidak setuju
- .....
- .....
- .....

14. Proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan telah dilakukan oleh para penegak hukum (jaksa, advokat, saksi ahli, hakim) dengan berbagai proses, namun hasil keputusan sering dirasa tidak mewakili rasa keadilan di tengah masyarakat menurut anda apa penyebabnya?

Jawab: .....  
.....  
.....  
.....  
.....



Terimakasih atas partisipasi dan kerjasama anda, semoga partisipasi anda diridhoi Allah SWT, menjadi amal ibadah dan menambah cakrawala ilmu didunia pendidikan.

Amin Ya Robbal 'alamin..

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat anda tentang peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan?
2. Bagaimana menurut anda tentang peran advokat dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan?
3. Bagaimana menurut anda tentang peran saksi ahli dalam proses penegakan hukum acara pidana di pengadilan?
4. Bagaimana menurut anda tentang hakim non-muslim dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan?
5. Bagaimana menurut anda tentang hakim wanita dalam proses hukum acara pidana di pengadilan?
6. Setujukah anda putusan hakim dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinannya?
7. Menurut anda, apakah proses hukum acara pidana di pengadilan sudah bisa mewujudkan tegaknya keadilan?

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wahyuni, lahir di Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 1 April 1986. Penulis adalah anak pertama dari tiga orang bersaudara. Ayahnya bernama Mansur dan Ibunya bernama Rosmida, keduanya adalah orang tua yang sangat bersemangat dalam mendukung keberhasilan anaknya di dunia dan akhirat.

Penulis memulai pendidikan formalnya di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Yayasan Darul Hikmah di Kecamatan Pekanbaru Kota. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 017 Kota Pekanbaru dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Yayasan Darul Hikmah pada masa yang sama. Setelah tamat pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pekanbaru. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Pekanbaru dan mengikuti kegiatan Rohani Islam (Rohis) al-Fatah yang ada di sekolah tersebut.

Kemudian, penulis memilih melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada pilihan pertama. Selama berkuliah, penulis aktif di kegiatan studi keislaman yang ada di Universitas tersebut yaitu Forum Kajian Islam Intensif (FKII) asy-Syams. Selain itu, penulis juga aktif di organisasi pergerakan eksternal kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketertarikan penulis dalam dunia kemahasiswaan dan usaha perbaikan mendorong penulis untuk menuangkan pemikiran pada penelitian karya tulis ilmiahnya dengan judul: **“PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM,** (Studi Perbandingan antara Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab dengan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU)”.